



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 869/KPTS/DISKOMINFO/2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi serta untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kepala Daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim, Sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

- KEDUA : Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2022-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim sebagai deskripsi kondisi integrasi saat ini (*as-is*) disusun untuk periode tahun 2023 dan target capaiannya (*to be*) sampai tahun 2026 sebagaimana jangka waktu berakhirnya periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- KEEMPAT : Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim meliputi:
1. Bab I Pendahuluan
 2. Bab II Arsitektur SPBE *as-is*
 3. Bab III Target Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim
 4. Bab IV Penutup
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal *27 Desember* 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD RIZALI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 869/KPTS/DISKOMINFO/2023
TENTANG : ARSITEKTUR ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE diamanatkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Untuk memenuhi amanat tersebut maka Kabupaten Muara Enim melakukan penyusunan arsitektur SPBE kondisi saat ini untuk dapat menjadi panduan dalam melakukan pengelolaan SPBE di Kabupaten Muara Enim secara lebih efektif dan efisien serta terpadu.

Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim disusun sesuai dengan panduan yang tersaji dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta telah diselaraskan dengan Peraturan Presiden nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dalam rangka mendapatkan keterpaduan tata kelola TIK di Kabupaten Muara Enim, di mana arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim terdiri atas 6 (enam) domain, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis
2. Domain Data dan Informasi
3. Domain Layanan SPBE
4. Domain Aplikasi SPBE
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Keamanan SPBE.

Penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim ini, dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dan seluruh unsur terkait dalam melakukan penerapan dan pengelolaan SPBE. Mengacu pada inisiatif strategis yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 18 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kabupaten Muara Enim memprioritaskan inisiatif strategisnya pada pencapaian target reformasi birokrasi tematik yang disesuaikan dengan target inisiatif strategis SPBE nasional dan visi misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”**, dengan beberapa misi yang diusung, antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani;
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani;
3. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal;
4. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas;
5. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik;
6. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi;
7. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar; dan
8. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

Visi dan misi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi saat ini, yang memfokuskan pada 4 (empat) kluster prioritas, yakni:

1. Penurunan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan; dan

4. Percepatan program prioritas Presiden (stunting, inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dll).

Dengan demikian, tentunya arsitektur SPBE yang dibangun oleh Kabupaten Muara Enim harus mampu mendukung dalam rangka perwujudan visi dan misi RPJPD, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta prioritas reformasi birokrasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini sudah menjadi program penting yang bersifat mendesak, sehingga pelaksanaan penerapan SPBE) merupakan alat utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan visi SPBE yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi”. Proses birokrasi berbasis digital yang elementer menjadi prioritas dilakukan demi terwujudnya hasil dan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis serta didukung oleh budaya birokrasi yang berintegritas yang tinggi. Dengan demikian, pembangunan dan penerapan SPBE instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.

Hal tersebut di atas tentunya menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat, instansi pemerintah, maupun ASN. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional kemudian menjadi acuan dalam penerapan SPBE khususnya dalam pengintegrasian proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi serta layanan

pemerintah yang koheren dan sistematis secara nasional. Untuk itu diperlukan penyusunan Arsitektur Kabupaten Muara Enim yang telah diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

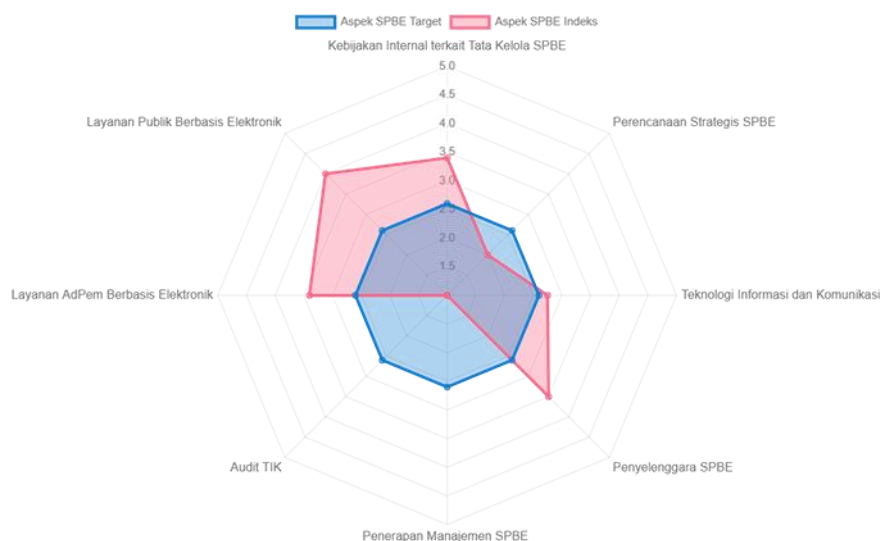
Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim adalah:

- 1) Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional;
- 2) Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

1.3. Gambaran Kondisi Penerapan SPBE Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2022, penerapan SPBE di Kabupaten Muara Enim masih perlu perbaikan di setiap unsur-unsur SPBE. Hal ini tercermin dari capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2022 yang baru mencapai tingkat kematangan 2,91. Tingkat kematangan yang dicapai tersebut sudah masuk kategori baik, namun perlu perbaikan di segala aspek penerapan SPBE untuk mendongkrak nilai tingkat kematangan penerapan SPBE di Kabupaten Muara Enim agar dapat memenuhi target indeks SPBE Kabupaten Muara Enim yang sebesar 3,00 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim, domain penilaian evaluasi SPBE dari sisi kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE sudah mencapai baik, namun masih perlu perbaikan pada penerapan manajemen SPBE. Dari domain kebijakan, hasil capaian tingkat kematangan penerapan SPBE sebesar 3,40, yang artinya Kabupaten Muara Enim sudah memiliki beberapa

kebijakan internal sebagai payung hukum dalam penerapan SPBE namun belum komprehensif. Dari domain tata kelola TIK, capaian tingkat kematangan penerapannya adalah sebesar 2,60, yang artinya Kabupaten Muara Enim sudah memiliki tata kelola TIK yang cukup baik dalam menerapkan SPBE, baik dari sisi aplikasi, infrastruktur, maupun keamanan SPBE. Dari domain manajemen SPBE, capaian tingkat kematangan adalah sebesar 1,00 yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen SPBE masih sangat kurang. Dari domain layanan SPBE, capaian tingkat kematangan penerapan adalah sebesar 3,64 yang dapat diartikan bahwa seluruh layanan baik administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan publik berbasis elektronik tingkat kapabilitasnya sudah baik. Melihat kondisi capaian ini, masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam menerapkan SPBE di Kabupaten Muara Enim.



Gambar 1. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Kabupaten Muara Enim, Tahun 2022

1.4. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional yang diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE di Kabupaten Muara Enim. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.

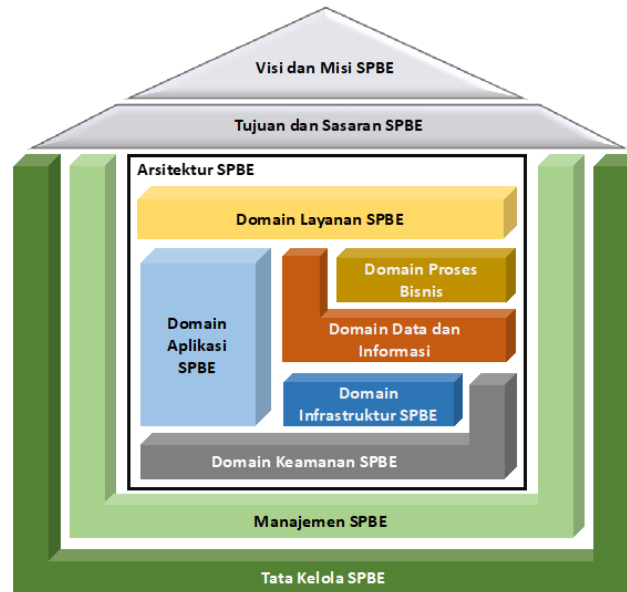
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

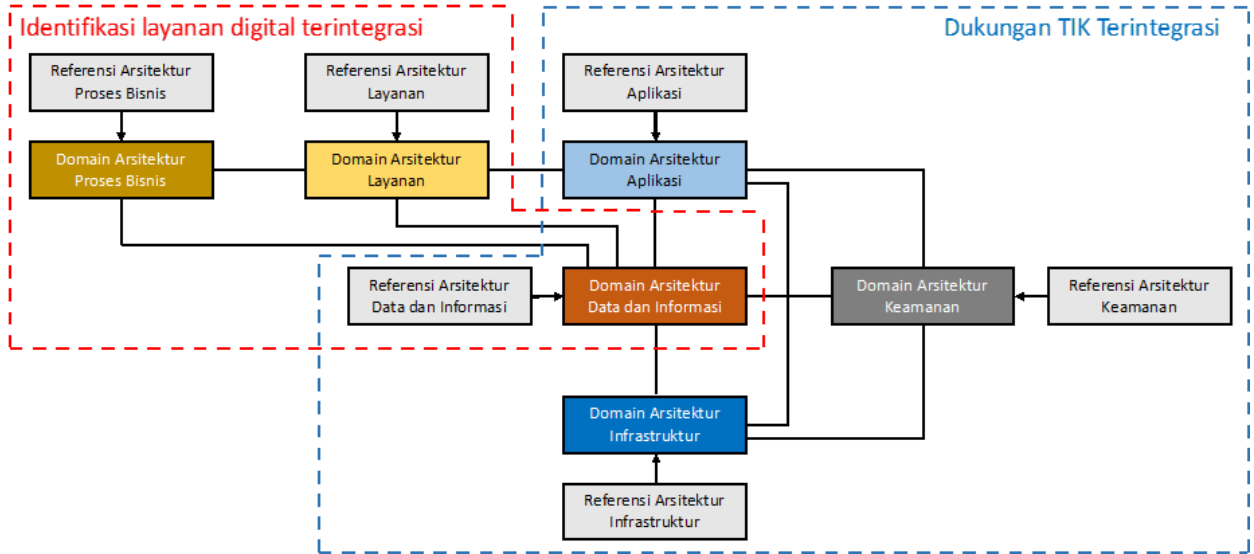
- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Ilustrasi kerangka kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim diselaraskan dengan arsitektur SPBE nasional yang diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 3. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).



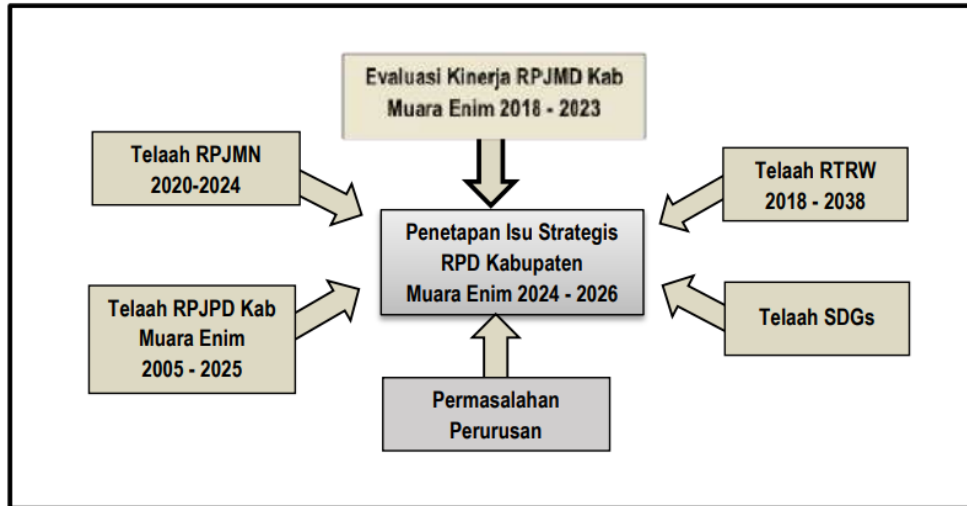
Gambar 3. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

BAB II ARSITEKTUR SPBE AS-IS

2.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

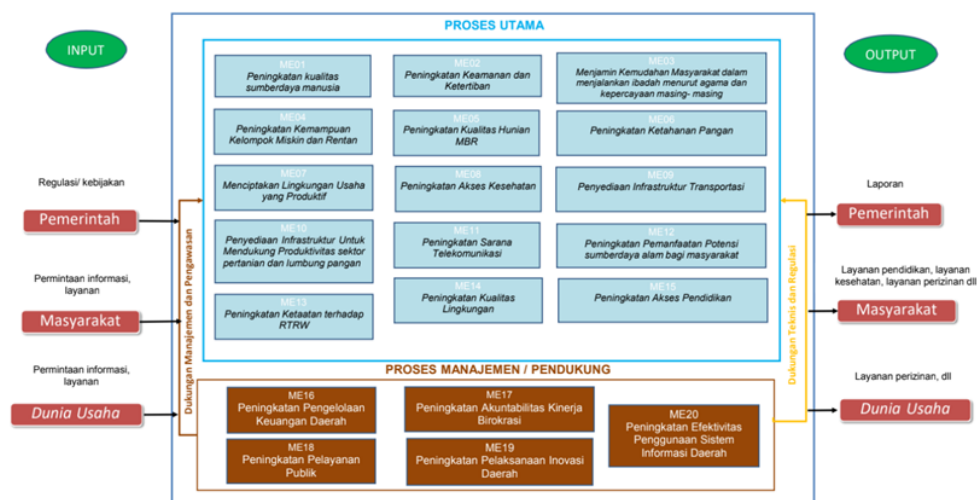
Mengacu pada definisi dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mencanangkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026. Perencanaan tersebut berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan di lingkup Kabupaten Muara Enim yang disusun secara terstruktur. Substansi Arsitektur Domain Proses Bisnis Kabupaten Muara Enim diidentifikasi dengan menganalisis RPD tersebut. Beberapa informasi terkait kegiatan dan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim juga dilihat dalam rencana strategis perangkat daerah. Selain itu, pemetaan proses bisnis yang telah dilakukan sebelumnya juga menjadi dasar dalam identifikasi domain arsitektur proses bisnis, khususnya untuk kondisi saat ini (*as-is condition*).

Berdasarkan komponen isu strategis yang tertuang pada RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026, gambaran komponen pembentuk isu strategis adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Gambaran Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Muara Enim

Isu strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam peta proses bisnis level 0 Kabupaten Muara Enim yang diilustrasikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Proses Bisnis Level 0 Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan peta proses bisnis tersebut, selanjutnya diidentifikasi seluruh domain proses bisnis di Kabupaten Muara Enim yang berelasi dengan seluruh proses level 0 yang dilakukan. Hasil identifikasi selanjutnya dilengkapi dengan referensi arsitektur yang bersesuaian dan metadata yang diperlukan, termasuk didalamnya menentukan sasaran strategis yang bersesuaian dalam RPD dan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pemetaan domain arsitektur proses bisnis, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis (As-Is) Kabupaten Muara Enim

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.01.01.07.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tersedianya Sarana Telekomunikasi untuk Memudahkan Arus Informasi dengan Lebih Luas dan Cepat	Cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.01 PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI	RAB.01.01 PERTAHANAN	RAB.01.01.07 PERTAHANAN SIBER
ME-DAB.02.01.02.01	Perencanaan dan Pengembangan Industri	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	10.5	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.02 PENUMBUH-KEMBANGAN INDUSTRI DALAM NEGERI
ME-DAB.02.01.05.01	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.05 PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.02.02.01	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAB.02.02.03.01	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Pengguna dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.03 PERDAGANGAN DALAM NEGERI
ME-DAB.02.02.06.01	Penyediaan dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.06 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
ME-DAB.02.02.06.02	Penetapan Standar Ukur	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.06 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
ME-DAB.02.03.01.01	Pengendalian bencana pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Penyuluh yang melaksanakan pelayanan kepada kelompok Tani	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.02.03 .01.02	Penanggulangan bencana pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Penyuluh yang melaksanakan pelayanan kepada kelompok Tani	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME- DAB.02.03 .01.03	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan	IKU 1. Persentase Pembinaan Lembaga Tani berbasis Agribisnis, IKU 2. Tingkat Komoditi Pertanian Unggul yang dikenal Masyarakat, IKU 3. Produksi Produk Hasil Olahan Pternakan (Ton)	IKU 1. 34.5%, IKU 2. 34.5%, IKU 3 100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pternakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL
ME- DAB.02.03 .01.04	Penyuluhan Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Implementasi Penyuluhan Pertanian / Perkebunan	100	Dinas Perkebunan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.02.03 .02.01	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
ME- DAB.02.03 .03.01	Penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Luas Lahan Pertanian / Perkebunan untuk Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	65	Dinas Perkebunan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
ME- DAB.02.03 .03.02	Penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Luas Lahan Pertanian / Perkebunan untuk Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70	Dinas Perkebunan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
ME- DAB.02.03 .03.03	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	60	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.03.04.02	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	83	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAB.02.03.04.03	Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Cakupan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	95	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAB.02.03.04.04	Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Cakupan PSAT yang diuji, diregistrasi dan disertifikasi	100	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAB.02.03.04.01	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Pangan Utama IKU 1. Beras, IKU 2. Daging, IKU 3. Telur, IKU 4, Ikan	IKU 1. 121030, IKU 2. 10293, IKU 3. 7048, IKU 4. 11971	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAB.02.03.06.01	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	79	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PENYEDIAAN SARANA DAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
					dan Pernakan			PRASARANA PERTANIAN
ME- DAB.02.04 .04.01	Pengendalian dan Penanggulangan bencana perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Luas Lahan Pertanian / Perkebunan Yang Dapat Dikendalikan dan ditanggulangi dalam Bencana Pertanian	60	Dinas Perkebunan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.04 PERKEBUNAN	RAB.02.04.04 PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
ME- DAB.02.05 .03.01	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Tingkat Kematian Ternak	0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.03 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
ME- DAB.02.06 .01.XX	Pengelolaan Data Perikanan	Tersedianya data perikanan yang akurat, relevan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan	Volume produksi perikanan	(produksi perikanan budidaya 8.539,69 ton) (produksi perikanan tangkap 3.432,77 ton) dan (produksi produk olahan	Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
				ikan 965,82 ton)				
ME- DAB.02.06 .03.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase perairan umum yang terkelola untuk perikanan tangkap	3	Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME- DAB.02.06 .03.02	Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya ketahanan pangan	IKU 1. Persentase nilai tambah produk hasil perikanan, IKU 2. Persentase ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)	IKU 1. 100, IKU 2. 75	Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL
ME- DAB.02.06 .03.03	Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya ketahanan pangan	IKU 1. Persentase nilai tambah produk hasil perikanan, IKU 2. Persentase ketersediaan pasokan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)	IKU 1. 100, IKU 2. 75	Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.06.06.01	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Luasan Tambahan Kawasan Perikanan Budidaya	100	Dinas Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAB.02.07.01.XX	Pembinaan BUMD dan BLUD	Tata kelola BUMD dan BLUD yang Baik (<i>good corporate governance</i>)	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BLUD	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.07 BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAB.02.07.01 PEMBINAAN BADAN USAHA REGIONAL
ME-DAB.02.07.02.XX	Pengawasan BUMD dan BLUD	Tata kelola BUMD dan BLUD yang Baik (<i>good corporate governance</i>)	Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BLUD	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.07 BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAB.02.07.02 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ME-DAB.02.08.01.01	Perizinan Usaha Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Perusahaan Perkebunan Yang Mendapat Rekomendasi Izin Usaha Pertanian / Perkebunan	100	Dinas Perkebunan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PEMBINAAN PENANAMAN MODAL REGIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.08.01.02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri	907 Milyar Nilai Uang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PEMBINAAN PENANAMAN MODAL REGIONAL
ME-DAB.02.08.01.03	Pengendalian Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Monitoring Usaha Industri Kecil dan Menengah	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PEMBINAAN PENANAMAN MODAL REGIONAL
ME-DAB.02.08.02.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	IKU 1. Jumlah Kajian potensi dan Peluang Investasi yang dilaksanakan, IKU 2. Jumlah perusahaan yang bermitra dengan UMKM	IKU 1. 1 Kajian, IKU 2. 2 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.08.02.02	Promosi Penanaman Modal	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Meningkatnya minat Investasi	55 Izin Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAB.02.08.02.03	Pelayanan Penanaman Modal	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Tersedianya Data/Informasi Pelayanan Penanaman Modal	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAB.02.08.03.01	Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	94.43%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.02.08 .03.02	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Rekapitulasi jumlah izin terbit perizinan dan non perizinan	950 Izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME- DAB.02.09 .01.01	Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	1.05%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME- DAB.02.09 .01.02	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang bersertifikat	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.09.03.01	Pemberdayaan Koperasi	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Koperasi Aktif	87.52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
ME-DAB.02.09.03.02	Perlindungan Koperasi	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Koperasi Aktif	87.52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
ME-DAB.02.09.04.01	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Koperasi Sehat	36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.09.04.02	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase KSP/USP koperasi yang sehat	80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
ME-DAB.02.10.01.01	Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	UMKM Aktif	15903	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAB.02.10.02.01	Pengembangan UMKM	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	IKU 1. USAHA KECIL Naik Kelas, IKU 2. USAHA MENENGAH Naik Kelas, IKU 3. USAHA MIKRO Naik Kelas	IKU 1. 14760, IKU 2. 1082, IKU 3. 61	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.02 KELEMBAGAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.10.04.01	Pemberdayaan UMKM	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Pertumbuhan Wirausaha baru	10000 UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.04 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ME-DAB.02.11.02.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.32	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAB.02.11.02.02	Pemasaran Pariwisata	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Jumlah Kunjungan Wisatawan	32500 orang	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 PEMASARAN PARIWISATA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.02.11.02.03	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Jumlah Kemitraan di bidang pariwisata	65	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAB.02.11.04.02	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase peningkatan prasarana ruang kreatif/ zona kreatif	32.5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.04 INFRASTRUKTUR PARIWISATA
ME-DAB.03.01.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	12 Bulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
ME-DAB.03.01.02.02	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Cakupan Layanan Penerangan Jalan Umum	5,3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan,	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
ME- DAB.03.01 .02.03	Penyediaan Kelengkapan Infrastruktur Transportasi	Tersedianya Infrastruktur Transportasi untuk Memperlancar Arus Barang, Jasa, Manusia dan Menjadi Penghubung yang Efisien antara Sumber Bahan Baku, Pusat Produksi dan Pasar	Persentase Kelengkapan Jalan dalam kondisi baik	95,33	Dinas Perhubungan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.03.01.02.04	Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Infrastruktur Transportasi untuk Memperlancar Arus Barang, Jasa, Manusia dan Menjadi Penghubung yang Efisien antara Sumber Bahan Baku, Pusat Produksi dan Pasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	95.33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
ME-DAB.03.01.02.05	Peningkatan persentase kondisi jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Persentase Kondisi Jalan Baik	Persentase Kondisi Jalan Baik	93,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01. PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMU
ME-DAB.03.01.03.01	Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.01 .04.01	Peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	99,32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.04 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ME- DAB.03.01 .04.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.04 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ME- DAB.03.01 .05.01	Peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Minum Layak)	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
ME- DAB.03.01 .05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase penduduk berakses air minum	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.03.01.05.03	Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Produktivitas sektor pertanian dan Lumbung Pangan	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan	Indeks Kinerja Sistem irigasi (IKSI)	Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
ME-DAB.03.01.05.04	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan	Persentase Jaringan irigrasi dalam kondisi baik	71.09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
ME-DAB.03.01.05.05	Peningkatan Persentase IKSI	Meningkatannya nilai IKSI	Persentase IKSI	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01. PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05.PE NGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
ME-DAB.03.01.05.06	Peningkatan Persentase Akses Air Minum Layak	Meningkatnya persentase akses air minum	Persentase akses air minum	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01. PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05.PE NGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.02 .02.01	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Infrastruktur Transportasi untuk Memperlancar Arus Barang, Jasa, Manusia dan Menjadi Penghubung yang Efisien antara Sumber Bahan Baku, Pusat Produksi dan Pasar	Persentase warga eks trans yang memiliki usaha mandiri	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.02 TRANSMIGRASI	RAB.03.02.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRAN
ME- DAB.03.03 .02.01	Pengelolaan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Infrastruktur Transportasi untuk Memperlancar Arus Barang, Jasa, Manusia dan Menjadi Penghubung yang Efisien antara Sumber Bahan Baku, Pusat Produksi dan Pasar	persentase terciptanya Pelayanan Angkutan Jalan, Sungai dan Danau yang Murah, Mudah dan Selamat	65	Dinas Perhubungan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN TRANSPORTASI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.03 .03.01	Penyediaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Infrastruktur Transportasi untuk Memperlancar Arus Barang, Jasa, Manusia dan Menjadi Penghubung yang Efisien antara Sumber Bahan Baku, Pusat Produksi dan Pasar	Persentase Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72.8	Dinas Perhubungan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
ME- DAB.03.04 .03.03	Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase peningkatan luas kawasan permukiman	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGA N KAWASAN PERMUKIMAN
ME- DAB.03.04 .03.01	Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase Permukiman yang tertata	91,73	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGA N KAWASAN PERMUKIMAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.04 .03.02	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi, Klasifikasi dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Cakupan Pelayanan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Kawasan Permukiman	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
ME- DAB.03.04 .05.01	Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.05 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
ME- DAB.03.05 .04.04	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan di kecamatan	100	Kecamatan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAB.03.05.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.03.05.03.01	Penataan Desa	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase desa yang ditata	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAB.03.05.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
ME-DAB.03.05.04.01	Peningkatan Kerjasama Desa	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAB.03.05.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ME-DAB.03.05.04.02	Administrasi Pemerintahan	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Peningkatan administrasi desa	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAB.03.05.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.05 .04.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	70	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAB.03.05.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ME- DAB.03.06 .04.01	Pengelolaan Tanah Kosong	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH
ME- DAB.03.06 .04.02	Penatagunaan Tanah	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Penatagunaan Tanah	90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.03.06 .05.01	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Penyelesaian Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.05 LITIGASI PERTANAHAN
ME- DAB.03.06 .04.03	Peningkatan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH
ME- DAB.03.06 .04.04	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase bangunan gedung dan lingkungan atau kawasan yang sesuai dengan intensitas dan pemanfaatan ruang	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH
ME- DAB.03.06 .04.05	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase Luas bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip dan	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
			pemanfaatan ruang					
ME-DAB.03.06.04.06	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Tingkat ketaatan tata ruang	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.04 TATA RUANG TANAH
ME-DAB.03.07.02.01	Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan Kebijakan Kependudukan yang dilaksanakan	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME-DAB.03.07.03.01	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Contraception Prevalention Rate / KB Aktif	68,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.03 KELUARGA BERENCANA
ME-DAB.03.07.03.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Keluarga	50,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.03 KELUARGA BERENCANA
ME-DAB.04.01.01.01	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Akses Kesehatan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	100	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.04.01.02.01	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Akses Kesehatan	Persentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	100	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
ME-DAB.04.01.03.01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69.51	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAB.04.01.04.01	Peningkatan Akses Kesehatan	Meningkatnya Akses Kesehatan	IKU 1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk, IKU 2. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, IKU 3. Rasio Dokter per Satuan Penduduk, IKU 4. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	IKU 1. 0.25, IKU 2. 0.01, IKU 3. 0.45, IKU 4. 3.25	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 TENAGA KESEHATAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.04.01.04.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Akses Kesehatan	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 TENAGA KESEHATAN
ME-DAB.04.02.01.01	Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi			Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAB.04.02.01.02	Pemberian Jaminan Sosial	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi			Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.04.02 .01.03	Pemberian Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi			Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME- DAB.04.02 .04.01	Penanganan Masyarakat Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi		92	Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PEMBANGUNAN MANUSIA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.04.02.06.01	Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi			Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA
ME-DAB.04.02.01.XX	Adopsi Anak	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi			Dinas Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAB.04.02.05.01	Peningkatan Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Miskin dan Rentan Dalam Menghadapi dan Keluar dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin	10,39	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.05 PENANGANAN FAKIR MISKIN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.04.02 .06.02	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Cakupan Wilayah Siaga Bencana, IKU 2. Persentase Penanggulangan bencana yang ditangani	IKU 1. 100, IKU 2. 100	Badan Penanggulan an Bencana Daerah	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENANGGULANG AN BENCANA
ME- DAB.04.02 .06.03	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Cakupan Wilayah Kebakaran, IKU 2. Persentase Penanggulangan kebakaran yang ditangani	IKU 1. 100, IKU 2. 100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENANGGULANG AN KEBAKARAN
ME- DAB.04.02 .06.04	Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan yang ditangani	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENANGGULANG AN KEBAKARAN
ME- DAB.04.03 .02.01	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	20	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.04.03 .03.01	Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PUG	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.03 KESETARAAN GENDER
ME- DAB.04.03 .03.02	Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	IPG, IDG		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.03 KESETARAAN GENDER
ME- DAB.04.03 .04.01	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Utama	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME- DAB.04.03 .04.02	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Anak kasus kekerasan yang mendapat layanan	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME- DAB.04.03 .05.01	Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Perempuan yang mendapat layanan secara kompeherensif	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGA N SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	RAB.04.03.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.04.03.06.01	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Tersedianya Profil Gender dan Profil Anak	2 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.06 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK
ME-DAB.05.01.01.01	Pemberian Bantuan Hukum Gratis	masyarakat miskin/ tidak mampu yang membutuhkan pendampingan hukum gratis	jumlah masyarakat miskin/tidak mampu yang diberikan bantuan hukum gratis	80	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ME-DAB.05.01.01.02	Penyusunan Produk Hukum Daerah	perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum	jumlah produk hukum yang ditetapkan	80	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ME-DAB.05.01.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum	Meningkatnya kemudahan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat terkait informasi Produk Hukum Daerah	Terpublikasinya produk hukum daerah	80	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.05.02.01.01	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase cakupan penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	100	Satuan Polisi Pamong Praja	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAB.05.02.01.02	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	IKU1 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk IKU2 Konflik Bernuansa SARA	IKU 1. 1,69, IKU 2. 0	Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kecamatan, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAB.05.02.01.03	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan ketenteraman dan ketertiban	100	Kecamatan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 KETENTRAMAN DAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
			umum yang dilaksanakan di kecamatan					KETERTIBAN UMUM
ME-DAB.05.02.03.01	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Angka Kriminalitas yang Tertangani	9,04	Satuan Polisi Pamong Praja	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME
ME-DAB.06.01.02.01	Peningkatan Akses Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	IKU 1. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Dasar, IKU 2. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama, IKU 3. Rasio Guru per Murid Sekolah Dasar, IKU 4. Rasio Guru per Murid Sekolah	IKU 1. 1:168, IKU 2. 1:175, IKU 3. 1:24, IKU 4. 1:24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.06.01 .02.02	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK disatuan pendidikan)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME- DAB.06.01 .02.03	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan pendidikan sesuai ketentuan	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME- DAB.06.01 .02.04	Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan akses pelayanan pendidikan	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME- DAB.06.01 .02.05	Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Akses Pendidikan	Persentase angka kelulusan	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME- DAB.06.02 .01.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepemudaan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rasio Ketergantungan	44.89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pengendalian Penduduk	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKER JAAN	RAB.06.02.01 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIFITAS

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
					dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
ME-DAB.06.02.01.02	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Tenaga Kerja Terampil	74,16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIFITAS
ME-DAB.06.02.02.01	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingkat kesempatan kerja	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAB.06.02.02.02	Pemberian Rekomendasi Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.06.02 .03.01	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pekerja dan Pemberi Kerja	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKER JAAN	RAB.06.02.03 HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
ME- DAB.06.02 .05.01	Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen RTK	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKER JAAN	RAB.06.02.05 PERENCANAAN KETENAGAKERJ AAN NASIONAL
ME- DAB.06.02 .02.01	Pemberian Rekomendasi Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Tenaga Kerja Indonesia yang Terdaftar		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKER JAAN	RAB.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.06.03.05.01	Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah	Meningkatnya pelaksanaan inovasi daerah	IKU 1. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, IKU 2. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, IKU 3. Persentase implementasi rencana kelitbangan , IKU 4. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	IKU 1. 100, IKU 2. 100, IKU 3. 100, IKU 4. 100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.05 PENGELOLAAN INVENSI DAN INOVASI
ME-DAB.06.03.05.01	Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Jumlah Inovasi yang dibangun dan dibina Jumlah Kompetisi Inovasi Yang diikuti Jumlah	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.05 PENGELOLAAN INVENSI DAN INOVASI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
			Persiapan Penyusunan IID					
ME-DAB.06.03.05.02	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memudahkan pendaftaran pendataan hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pemohon	Layanan pendaftaran, konsultasi dan asistensi hak kekayaan intelektual	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.05 PENGELOLAAN INVENSI DAN INOVASI
ME-DAB.06.04.01.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBINAAN PEMUDA REGIONAL
ME-DAB.06.04.03.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.03 PENGEMBANGAN PEMUDA
ME-DAB.06.04.03.02	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.03 PENGEMBANGAN PEMUDA
ME-DAB.07.02.02.04	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya	Persentase pengawasan kegiatan produksi panas bumi di	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.02 ENERGI	RAB.07.02.02 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
		Alam Bagi Masyarakat	Kabupaten Muara Enim		dan Sumber Daya Mineral			
ME-DAB.07.05.01.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan izin lingkungan	100	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAB.07.05.02.03	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IKU 1. Indeks Kualitas Air, IKU 2. Indeks Kualitas Udara, 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKU 1. 52.80, IKU 2. 75.27, IKU 3. 38.21	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAB.07.05.02.04	Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAB.07.05.02.05	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase penyediaan Keanekaragaman Hayati	100	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.07.05.02.06	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase MHA yang diakui	100	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAB.07.05.02.07	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan	30	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAB.07.05.02.08	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Tingkat pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup	100	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAB.07.05.02.09	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.07.05 .04.01	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Terpenuhinya Pelayanan terhadap Masyarkat Umum terhadap kebijakan terkait Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut terhadap kebijakan terkait Sumber Daya Alam	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
ME- DAB.07.05 .04.02	Pemantauan aspek Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya Pelayanan terhadap Masyarkat Umum terhadap kebijakan di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut terhadap kebijakan di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
ME- DAB.07.05 .04.03	Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Kualitas Hunian MBR	Rasio Ruang Terbuka Hijau Kota per Satuan Luas Wilayah	50,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM UMUM

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.07.05 .05.01	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Tingkat pencemaran Limbah B3	85	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME- DAB.07.05 .05.02	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah	35.05	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME- DAB.07.05 .05.03	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	29.44	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME- DAB.07.05 .06.01	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	85	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.08.02.01.01	Pengembangan Kebudayaan	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pengembangan Kebudayaan	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PEMBINAAN KEBUDAYAAN REGIONAL
ME-DAB.08.02.02.01	Pembinaan Sejarah	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase pembinaan wawasan tentang sejarah	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.02 KESEJARAHAN
ME-DAB.08.02.02.02	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.02 KESEJARAHAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.08.02 .03.01	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase revitalisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.03 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
ME- DAB.08.02 .03.02	Pengelolaan Permuseum	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase inventarisasi, benda, situs dan kawasan cagar budaya	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.03 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
ME- DAB.08.02 .05.01	Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Pembinaan Perpustakaan di Desa	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME- DAB.08.02 .06.01	Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perbaikan sistem kearsipan di perangkat daerah	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.08.02 .06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKPD Yang Menyerahkan Arsip Inaktif	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS
ME- DAB.08.02 .07.01	Pengembangan Kesenian Tradisional	Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Persentase Pengembangan Seni Tradisional	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.07 PEMBINAAN PERFILMAN DAN KESENIAN
ME- DAB.08.02 .08.01	Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Akses Pendidikan	Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.08 PENGEMBANGA N SASTRA DAN BAHASA INDONESIA
ME- DAB.09.01 .01.01	Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kegiatan yang akan di Laksanakan	1 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.01 .02.01	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.02 KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
ME- DAB.09.01 .02.02	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kegiatan yang akan di Laksanakan	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.02 KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
ME- DAB.09.01 .03.01	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.03 OTONOMI DAERAH

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.01.03.02	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kegiatan yang akan di Laksanakan	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.03 OTONOMI DAERAH
ME-DAB.09.01.05.01	Pengelolaan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kualitas pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
ME-DAB.09.01.05.02	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kualitas Pelayanan Perekonomian dan pembangunan	100	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
ME-DAB.09.01.07.01	Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAB.09.01.07.02	Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Penduduk yang Memiliki	73	Dinas Kependudukan dan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 PENCATATAN SIPIL

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
			Dokumen Catatan Sipil		Pencatatan Sipil			
ME-DAB.09.01.07.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAB.09.01.07.04	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Jumlah Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAB.09.02.07.XX	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Koordinasi UMKM dan Perbankan	Jumlah laporan data dan informasi evaluasi kebijakan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya kebijakan perekonomian	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.07 MANAJEMEN EKONOMI MAKRO

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.02 .08.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase kelengkapan dokumen pengelolaan barang	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME- DAB.09.02 .09.01	Pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	7.8	Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME- DAB.09.02 .09.02	Penatausahaan pendapatan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	100	Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.10 PENATAUSAHAA N PENDAPATAN
ME- DAB.09.02 .10.01	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase peningkatan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.10 AKUNTABILITAS PENGUNAAN ANGGARAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.03.01.01	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Sarana Telekomunikasi untuk Memudahkan Arus Informasi dengan Lebih Luas dan Cepat	IKU 1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, IKU 2. Indeks domain Tata Kelola SPBE, IKU 3. Indeks Domain Layanan SPBE	IKU 1. 3.1, IKU 2. 2.8, IKU 3. 3.12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAB.09.03.02.01	Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi yang stabil	Laporan Upaya Pengendalian Inflasi	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAB.09.03.02.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi daerah	Indeks Kepuasan Pengguna	3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAB.09.03.04.01	Peningkatan efektifitas penggunaan sistem informasi daerah	Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.04.02.01	Penyediaan Sarana Telekomunikasi	Tersedianya Sarana Telekomunikasi untuk Memudahkan Arus Informasi dengan Lebih Luas dan Cepat	Persentase Desa yang Memiliki Akses Internet	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.04 KOMUNIKASI	RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
ME-DAB.09.04.02.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi daerah	Persentase diseminasi konten media komunikasi publik	90	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.04 KOMUNIKASI	RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
ME-DAB.09.05.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IKU 1. Persentase perencanaan sektoral yang berkualitas, IKU 2. Persentase capaian sasaran pembangunan sesuai target, IKU 3. Persentase program prioritas selaras dengan prioritas pembangunan	IKU 1. 100%, IKU 2. 100%, IKU 3. 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.05.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
ME-DAB.09.05.05.01.01	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Program Prioritas selaras dengan prioritas pembangunan	100	Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.05 PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LINTAS INSTANSI
ME-DAB.09.06.01.XX	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAB.09.06.02.04	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAB.09.06.02.XX	Fasilitasi SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.06.02.XX	Penyusunan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAB.09.06.03.XX	Penataan Kelembagaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAB.09.06.03.XX	Konsultasi Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAB.09.06.04.XX	Konsultasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAB.09.06.05.XX	Konsultasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, IKU 2. Indeks Pelayanan Publik, IKU 3. Indeks Maturitas SPIP, IKU 4. Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	IKU 1. Sangat Baik, IKU 2. A-, IKU 3. 3.02, IKU 4. 82	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.06 .05.XX	Fasilitasi Forum Konsultasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, IKU 2. Indeks Pelayanan Publik, IKU 3. Indeks Maturitas SPIP, IKU 4. Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	IKU 1. Sangat Baik, IKU 2. A-, IKU 3. 3.02, IKU 4. 82	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME- DAB.09.06 .05.XX	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, IKU 2. Indeks Pelayanan Publik, IKU 3. Indeks Maturitas SPIP, IKU 4. Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	IKU 1. Sangat Baik, IKU 2. A-, IKU 3. 3.02, IKU 4. 82	Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.06 .02.01	Peningkatan akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKU 1. Opini BPK, IKU 2. Nilai SAKIP	IKU 1. WTP, IKU 2. BB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME- DAB.09.06 .02.03	Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME- DAB.09.06 .02.06	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	100	Inspektorat	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.06 .02.07	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase kebijakan pendampingan dan asistensi serta sistem dan prosedur pengawasan yang baik	100	Inspektorat	RAB.09 PEMERINTAH N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME- DAB.09.06 .04.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase program kebijakan kepegawaian perangkat daerah	100	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	RAB.09 PEMERINTAH N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME- DAB.09.06 .04.02	Peningkatan update data kepegawaian	Meningkatnya Profesional Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kepuasan Pegawai	100	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	RAB.09 PEMERINTAH N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME- DAB.09.06 .04.03	Peningkatan pengelolaan arsip kepegawaian	Meningkatnya Profesional Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kepuasan Pegawai	100	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	RAB.09 PEMERINTAH N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.06.04.04	Peningkatan disiplin kehadiran pegawai	Meningkatnya Profesional Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kepuasan Pegawai	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAB.09.06.04.05	peningkatan kinerja pegawai	Meningkatnya Profesional Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kepuasan Pegawai	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAB.09.06.05.02	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Kecamatan	100	Kecamatan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAB.09.06.02.02	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai saku kategori Baik	100	Seluruh Perangkat Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME-DAB.09.06.05.01	Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKU 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, IKU 2. Indeks Pelayanan Publik, IKU 3. Indeks Maturitas SPIP, IKU 4. Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	IKU 1. Sangat Baik, IKU 2. A-, IKU 3. 3.02, IKU 4. 82	Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kecamatan, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAB.09.06.02.05	Fasilitasi Administrasi Umum DPRD Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Cakupan Kualitas Administrasi Kesekretariatan	100	Sekretariat Dewan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

ID	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) --	Nilai IKU Target	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
ME- DAB.09.06 .05.03	Pengesahan Peraturan Perundangan di Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Cakupan akses Publik, kualitas dan kuantitas Perda Prakarsa, serta kualitas Tenaga Ahli DPRD	90	Sekretariat Dewan	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME- DAB.09.06 .05.XX	Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			Sekretariat Dewan	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME- DAB.09.07 .04.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh kecamatan	100	Kecamatan	RAB.09 PEMERINTAHA N UMUM	RAB.09.07 KESEKRETARIA TAN NEGARA	RAB.09.07.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN

2.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Mengacu pada definisi dalam Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE mengacu pada referensi Arsitektur Layanan SPBE dan domain Proses Bisnis. Berdasarkan referensi Arsitektur Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan, Arsitektur Domain Layanan ini disusun berdasarkan kondisi saat ini (*as-is condition*) dimana untuk selanjutnya perlu disusun Arsitektur Domain Layanan target (*to-be*). Berikut ini adalah Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2. Domain Arsitektur Layanan (As-Is) Kabupaten Muara Enim

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.03.0 1.01	Layanan Pembuatan Surat Tanda Laporan LSM / Ormas	Untuk melakukan pendataan LSM/Ormas resmi yang terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Elektronik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.03 KENEGARAAN	RAL.01.03.01 PARTAI POLITIK
ME-DAL.01.03.0 1.02	Layanan Fasilitasi Administrasi Umum DPRD Kabupaten	memberikan fasilitasi kepada anggota dewan DPRD dalam pelaksanaan kegiatan penganggaran, keuangan, aset, kepegawaian, umum, barang dan jasa, Fasilitasi Kegiatan DPRD, peningkatan kapasitas DPRD	Sekretariat Dewan	Non Elektronik	Fasilitasi Administrasi Umum DPRD Kabupaten	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.03 KENEGARAAN	RAL.01.03.01 PARTAI POLITIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.03.02	Layanan Fasilitasi Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat	memberikan layanan fasilitasi penyerapan dan aspirasi oleh masyarakat umum kepada anggota dewan DPRD	Sekretariat Dewan	Non Elektronik	Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.03 KENEGARAAN	RAL.01.03.02 PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
ME-DAL.01.03.03	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Memfasilitasi penerbitan izin bagi ikm	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Elektronik	Pengendalian Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.03.03 LEGISLASI NASIONAL
ME-DAL.01.04.01.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Menciptakan Tata kelola BUMD dan BLUD yang baik	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pembinaan BUMD dan BLUD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.01.02	Layanan Seleksi dan Pengisian Jabatan BUMD dan BLUD	Menciptakan Tata kelola BUMD dan BLUD yang baik	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pembinaan BUMD dan BLUD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.01.03	Layanan Pengawasan BUMD dan BLUD	Menciptakan Tata kelola BUMD dan BLUD yang baik	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengawasan BUMD dan BLUD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.01.04	Layanan Fasilitasi Pengendalian Perekonomian	Menjaga kestabilan angka inflasi	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengendalian Perekonomian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.04.0 1.05	Layanan Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Menjaga kestabilan angka inflasi	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengendalian Perekonomian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.0 1.06	Layanan Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Memberikan informasi hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah	Elektronik	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.0 1.07	Layanan Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut aspek diBidang Sumber Daya Alam	Memfasilitasi pemenuhan pelayanan umum bagi masyarakat terkait kebijakan di bidang SDA	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.04.0 1.08	Layanan Monitoring dan Evaluasi Aspek Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Memfasilitasi kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	RAL.01.04.01 EKONOMI MAKRO
ME-DAL.01.05.0 2	Layanan Perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	Untuk mengembangkan IKM di kabupaten Muara Enim	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Non Elektronik	Pengendalian Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.02 PENUMBUH-KEMBANGAN INDUSTRI DALAM NEGERI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.05.0 4.01	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Elektronik	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.04 PENGELOLAAN STRUKTUR INDUSTRI
ME-DAL.01.05.0 4.02	Layanan Informasi Industri Nasional	Memfasilitasi informasi industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Elektronik	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.04 PENGELOLAAN STRUKTUR INDUSTRI
ME-DAL.01.06.0 2.01	Layanan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Non Elektronik	Penyediaan dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAL.01.06.0 2.02	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	menjaga stabilisasi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Non Elektronik	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.06.0 2.03	Layanan pelaksanaan metrologi legal	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, serta Penyidikan Metrologi Legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Elektronik	Penetapan Standar Ukur	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAL.01.06.0 3	Layanan Fasilitasi Pedagang Kuliner Pasar Ramadhan	Tersedianya fasilitas Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Non Elektronik	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.03 PERDAGANGAN DALAM NEGERI
ME-DAL.01.07.0 1	Layanan Penyuluhan pertanian	Melakukan penyuluhan Bidang Pertanian dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL
ME-DAL.01.07.0 3.01	Layanan Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Menyediakan dan mengembangkan sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura	Non Elektronik	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.03 PENYEDIAAN SARANA DAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			dan Peternakan					PRASARANA PERTANIAN
ME-DAL.01.07.0 3.02	Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Menyediakan dan mengembangkan prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Non Elektronik	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
ME-DAL.01.07.0 4.01	Layanan Posting Cinta	untuk memonitoring pola konsumsi pangan ibu dan anak bagi ibu Hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan Batuta	Dinas Ketahanan Pangan	Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.02	Layanan Pengendalian bencana pertanian	meningkatkan luas lahan yang tertangani serangan terhadap bencana pertanian (Hama dan Penyakit Tanaman)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Non Elektronik	Pengendalian bencana pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.07.0 4.03	Layanan Penanggulangan bencana pertanian	meningkatkan luas lahan yang tertangani serangan terhadap bencana pertanian (Hama dan Penyakit Tanaman)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Non Elektronik	Penanggulangan bencana pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.04	Layanan Informasi Harga Pangan	Untuk Menangkap Dinamika Harga Pangan Pada Lokasi tertentu dan Waktu Tertentu	Dinas Ketahanan Pangan	Elektronik	Pengelola Informasi Harga Pangan Pada Lokasi Tertentu dan Waktu Tertentu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.05	Layanan Informasi Situasi Ketersediaan Pangan (Neraca Bahan Makanan)	untuk mendapatkan informasi ketersediaan pangan pada wilayah dalam waktu tertentu	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.06	Layanan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	untuk mengetahui situasi kerawanan pangan dan gizi	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.07	Layanan Edukasi Kemandirian Pangan	Pemenuhan gizi keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.07.0 4.08	Layanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	penyediaan stok cadangan pangan yang dapat dikeluarkan/disalurkan	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.09	Layanan toko Tani	stabilisasi hargan kebutuhan pangan pokok	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.10	Layanan informasi ketersediaan pangan lokal	Penyediaan informasi ketersediaan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.11	Layanan Pola Konsumsi Pangan	Penyediaan data Konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.07.0 4.12	Layanan Edukasi makanan B2SA	Menyusun menu dan mengolah pangan menjadi makanan siap santap yang memenuhi kriteria B2SA	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.07.0 4.13	Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAL.01.08.0 1	Layanan Penyuluhan Perkebunan	Melakukan penyuluhan perkebunan	Dinas Perkebunan	Non Elektronik	Penyuluhan Perkebunan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.01 PEMBINAAN PERKEBUNAN REGIONAL
ME-DAL.01.08.0 3.01	Layanan Penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan	Menyediakan dan mengembangkan sarana perkebunan	Dinas Perkebunan	Non Elektronik	Penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.03 KEBERLANJUTAN USAHA PERKEBUNAN
ME-DAL.01.08.0 3.02	Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan	Menyediakan dan mengembangkan prasarana perkebunan	Dinas Perkebunan	Non Elektronik	Penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.03 KEBERLANJUTAN USAHA PERKEBUNAN
ME-DAL.01.08.0 3.03	Layanan Perizinan Usaha Perkebunan	Fasilitasi perizinan usaha perkebunan	Dinas Perkebunan	Non Elektronik	Perizinan Usaha Perkebunan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.03 KEBERLANJUTAN USAHA PERKEBUNAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.08.04	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan bencana perkebunan	Mengendalikan dan menanggulangi bencana perkebunan	Dinas Perkebunan	Non Elektronik	Pengendalian dan Penanggulangan bencana perkebunan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.04 PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
ME-DAL.01.09.03	Layanan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Vaksinasi dan Inseminasi Buatan guna peningkatan Populasi ternak	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Non Elektronik	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.03 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
ME-DAL.01.10.01.01	Layanan Penyuluhan Perikanan Tangkap	Memberikan penyuluhan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Dinas Perikanan	Non Elektronik	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL
ME-DAL.01.10.01.02	Layanan Pencacahan Data Perikanan Tangkap	Menyajikan data produksi perikanan tangkap, luas wilayah perairan umum daratan serta data nelayan dan perahu	Dinas Perikanan	Elektronik	Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.10.0 3.01	Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hasil Perikanan	Memberikan layanan pengujian produk olahan ikan	Dinas Perikanan	Non Elektronik	Pengolahan Hasil Perikanan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAL.01.10.0 3.02	Layanan Pencacahan Data Produk Olahan Ikan	Menyajikan data produksi produk olahan ikan	Dinas Perikanan	Elektronik	Pengolahan Hasil Perikanan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAL.01.10.0 3.03	Layanan Pencacahan Data Ketersediaan Ikan	Menyajikan data ketersediaan ikan (jenis dan volume)	Dinas Perikanan	Elektronik	Pemasaran Hasil Perikanan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAL.01.10.0 6.01	Layanan Penyuluhan Perikanan Budidaya	Memberikan penyuluhan perikanan budidaya ikan	Dinas Perikanan	Non Elektronik	Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAL.01.10.0 6.02	Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan Umum Daratan dan Wadah Budidaya	Memberikan layanan kesehatan bagi ikan dan lingkungan perairan (kualitas air)	Dinas Perikanan	Non Elektronik	Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAL.01.10.0 6.03	Layanan Pencacahan Data Perikanan Budidaya	Menyajikan data produksi benih ikan, data produksi budidaya	Dinas Perikanan	Elektronik	Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.06 PERIKANAN BUDIDAYA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		ikan, data luasan wilayah budidaya						
ME-DAL.01.12.0 2.01	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Memberikan informasi kajian potensi investasi dan peningkatan kemitraan perusahaan dan UMKM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAL.01.12.0 2.02	Layanan Promosi Investasi/Penanaman Modal	Meningkatkan minat investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Promosi Penanaman Modal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAL.01.12.0 2.03	Layanan Penanaman Modal	Mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Pelayanan Penanaman Modal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.12.0 2.04	Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan realisasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAL.01.13.0 1.01	Layanan Satgas Koperasi	Melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh appraisal independent (tanah, bangunan dan lainnya seperti piutang); melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukum; dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.13.0 1.02	Layanan Pembinaan SDM Koperasi	Menciptakan dan mengembangkan kompetensi perkoperasian bagi setiap pengurus/anggota koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAL.01.13.0 1.03	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAL.01.13.0 1.04	Layanan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi	Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan pengurus/anggota koperasi sesuai dengan perkembangan teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.13.0 1.05	Layanan Konsultasi dan Pembinaan terhadap Pelaku UMKM	Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pemberdayaan UMKM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAL.01.13.0 3	Layanan Informasi Manajemen Koperasi	Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan dan pendampingan bagi Koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Elektronik	Pemberdayaan Koperasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
ME-DAL.01.14.0 1.01	Layanan PINUS UMKM GO MARKET	Tersedianya tempat interaksi bagi UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Tersedianya tempat Interaksi dan Komunikasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pengembangan UMKM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		dan Konsultasi bagi kegiatan UMKM yang dapat digunakan oleh semua lapisan UMKM dengan aneka jenis usahanya						
ME-DAL.01.14.0 1.02	Fasilitasi Sarana dan Prasarana kepada Pelaku UMKM	Untuk memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi maupun pemasaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pengembangan UMKM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAL.01.14.0 1.03	Layanan penerbitan Keterangan Usaha Pelaku UKM melalui aplikasi OSS	Memberikan Penerbitan Keterangan Usaha Pelaku UKM	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAL.01.14.0 1.04	Layanan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	Memberikan Layanan Agar Usaha Mikro dan Kecil bisa memperoleh izin menjalankan usaha sehingga	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		dapat dilakukan pembinaan dan monitoring oleh pemerintah setempat.						
ME-DAL.01.14.01.05	Layanan penerbitan Keterangan Usaha Pelaku UKM melalui aplikasi OSS	Memberikan Penerbitan Keterangan Usaha Pelaku UKM	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAL.01.14.01.06	Layanan legalisasi surat keterangan usaha	Memberikan Layanan legalisasi surat keterangan usaha	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAL.01.14.02	Layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Memberikan dokumen surat IUMK	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.02 KELEMBAGAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.14.03	Layanan Pemasaran Produk UMKM	Menciptakan pasar konsumen yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan penjualan produk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Non Elektronik	Pengembangan UMKM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.03 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAL.01.14.04	Layanan Bantuan Akses KUR	Mempermudah akses kepada pelaku UMKM untuk memperoleh KUR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Elektronik	Pengembangan UMKM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.04 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ME-DAL.01.15.02.01	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatkan daya tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Non Elektronik	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAL.01.15.02.02	Layanan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Informasi Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Elektronik	Pemasaran Pariwisata	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAL.01.15.03.01	Layanan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	Meningkatkan Informasi Pendaftaran HaKI untuk Pelaku Usaha Ekraf	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Non Elektronik	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
ME-DAL.01.15.0 3.01	Layanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Meningkatkan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
ME-DAL.01.16.0 3.01	Layanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI	RAL.01.16.03 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		penyelenggaraannya						
ME-DAL.01.16.0 3.02	Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS	Mempercepat perizinan berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI	RAL.01.16.03 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ME-DAL.01.19.0 2.01	Layanan KIR online	Mempermudah masyarakat untuk mendaftar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Elektronik	Pengelolaan Pelayanan Angkutan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PELAYANAN TRANSPORTASI
ME-DAL.01.19.0 2.02	Layanan Bus Sekolah Edukasi Dijalan	Membantu anak - anak sekolah bisa tetap membaca di dalam bus sekolah	Dinas Perhubungan	Non Elektronik	Pengelolaan Pelayanan Angkutan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PELAYANAN TRANSPORTASI
ME-DAL.01.19.0 2.03	Layanan Bus BRT	Membantu Transportasi Masyarakat yang belum ada trayek transportasi umum	Dinas Perhubungan	Non Elektronik	Pengelolaan Pelayanan Angkutan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PELAYANAN TRANSPORTASI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.21.03	Layanan administrasi bonus produksi panas bumi	mengetahui jumlah bonus produksi panas bumi yang dihasilkan setiap triwulan dan tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Non Elektronik	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.37 ENERGI	RAL.01.21.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
ME-DAL.01.22.01.01	Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah	Memberikan Layanan Agar Masyarakat Memiliki Surat Tanah Yang Legal.	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PEMBINAAN PERTANAHAN REGIONAL
ME-DAL.01.22.01.02	Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah	Memberikan Layanan Agar Masyarakat Memiliki Surat Tanah Yang Legal.	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PEMBINAAN PERTANAHAN REGIONAL
ME-DAL.01.23.01	Layanan Pengendalian Penduduk	Memberikan Data Hasil Pelaksanaan Program Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Elektronik	Pengendalian Penduduk	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME-DAL.01.23.03.01	Layanan Pengendalian Penduduk	Menyediakan Data Kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Elektronik	Pengendalian Penduduk	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 KELUARGA BERENCANA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			Keluarga Berencana					
ME-DAL.01.23.0 3.02	Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Memberikan Pendampingan kepada Catin, Balita, Baduta, Bumil, dan Bupas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Elektronik	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUK AN	RAL.01.23.03 KELUARGA BERENCANA
ME-DAL.01.23.0 3.03	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana	Untuk Pendataan Keluarga, dan Pelaporan Pelayanan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Elektronik	Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUK AN	RAL.01.23.03 KELUARGA BERENCANA
ME-DAL.01.23.0 5.01	Layanan penerbitan KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah	Memberikan rekomendasi untuk penerbitan/ pencetakan KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUK AN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.23.0 5.02	Layanan penerbitan kartu identitas anak (KIA)	Memberikan dokumen KIA	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.03	Layanan Penerbitan KTP, KK dan KIA	Memberikan Layanan Agar Masyarakat tercatat sebagai penduduk di Wilayah tersebut.	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.04	Layanan Penerbitan KTP, KK dan KIA	Memberikan Layanan Agar Masyarakat tercatat sebagai penduduk di Wilayah tersebut.	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.05	Layanan penerbitan KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah	Memberikan rekomendasi untuk penerbitan/ pencetakan KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.23.0 5.06	Layanan Penerbitan KK, KTP, KIA	Memberikan pelayanan Penerbitan KK, KTP, KIA	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.07	Layanan pengantar pindah domisili	Memberikan layanan pengantar pindah domisili	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.08	Layanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Memberikan Dokumen Identitas Kependudukan (KK,KTP,KIA,SKP WNI)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.0 5.09	Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Memberikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengangkatan Anak, dan Akta Perkawinan serta Akta Perceraian).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.23.05.10	Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan sosialisasi terkait informasi administrasi kependudukan dan pemenuhan data agregat kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.23.05.11	Layanan Perjanjian Kerja Sama Perangkat Daerah dan Inovasi Pelayanan	Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah dan meningkatkan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.05 PENCATATAN SIPIL
ME-DAL.01.24.04	Layanan Informasi Perencanaan Infrastruktur	Aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai website Bank Data Infrastruktur yang mendukung tata kelola pemerintah berbasis elektronik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Elektronik	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.25.0 2.01	Fasilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	Melakukan pencatatan terhadap pelayanan di puskesmas baik di dalam gedung dan diluar gedung	Dinas Kesehatan	Elektronik	Peningkatan Akses Kesehatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAL.01.25.0 2.02	Layanan terhadap kejadian kegawatdaruratan kesehatan	PSC (Publik Safety Center) 119 memberikan layanan terhadap kedaruratan kesehatan secara terintegrasi	Dinas Kesehatan	Elektronik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAL.01.25.0 2.03	Layanan Kesehatan Primer	Melakukan pencatatan pelayanan pada ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia	Dinas Kesehatan	Elektronik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.25.0 2.04	Layanan Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	menghubungkan data pasien dari tingkat layanan pertama/lebih rendah ke tingkat layanan rujukan / yang lebih tinggi	Dinas Kesehatan	Elektronik	Peningkatan Akses Kesehatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAL.01.25.0 2.05	Layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine)	layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka atau secara jarak jauh	Dinas Kesehatan	Elektronik	Peningkatan Akses Kesehatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAL.01.25.0 2.06	Layanan pemantauan ketersediaan alat kesehatan, farmasi, makanan dan minuman	Aplikasi monitoring ketersediaan 132 item obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi	Dinas Kesehatan	Elektronik	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.25.0 2.07	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aplikasi monitoring ketersediaan 132 item obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi	Dinas Kesehatan	Elektronik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN
ME-DAL.01.25.0 2.08	Layanan pemantauan UKBM	Melakukan pencatatan terhadap aktivitas UKBM dibidang kesehatan	Dinas Kesehatan	Elektronik	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN
ME-DAL.01.25.0 2.09	Layanan pembiayaan kesehatan	Melakukan pencatatan terhadap proses penganggaran bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	Elektronik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.25 KESEHATAN	
ME-DAL.01.25.0 2.10	Layanan Edukasi Pola Konsumsi Pangan	Mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi. 2. Menyiapkan	Dinas Ketahanan Pangan	Elektronik				

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		desain sistem atas Mobile Apps monitoring Pola Konsumsi Pangan Ibu dan Anak. 3. Melakukan pembuatan aplikasi Mobile Apps monitoring Pola Konsumsi Pangan Ibu dan Anak berdasarkan dari desain sistem yang telah dibuat.						
ME-DAL.01.25.06	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	melakukan pencatatan terhadap penanggulangan penyakit	Dinas Kesehatan	Elektronik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGENDALIAN PENYAKIT
ME-DAL.01.26.01.01	Layanan Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah	memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Penyandang Masalah	Dinas Sosial	Elektronik	Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kesejahteraan Sosial						
ME-DAL.01.26.0 1.02	Layanan Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa	menangani Orang Dalam Gangguan Jiwa	Dinas Sosial	Non Elektronik	Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.03	Layanan Asuransi Kematian	Melayani asuransi kematian untuk kerabat yang ditinggalkan	Dinas Sosial	Elektronik	Pemberian Jaminan Sosial	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.04	Layanan Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	merekomendasikan LKS	Dinas Sosial	Non Elektronik	Pemberian Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.05	Layanan Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Mengelolah ajuan DTKS yang diajukan oleh Desa/Kecamatan	Dinas Sosial	Elektronik	Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.06	Layanan Pengolahan Ajuan Data Bansos PBI JKN		Dinas Sosial	Elektronik	Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.26.0 1.07	Layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bhineka tunggal ika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.08	Layanan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Untuk melakukan harmonisasi hubungan antar parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.09	Layanan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Harmonisasi hubungan antar LSM / Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 1.10	Layanan Pengawasan Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya pengembangan dan aktualisasi nilai nilai luhur budaya bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.26.0 1.11	Layanan Pengawasan Konflik Sosial	Deteksi dini terhadap konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAL.01.26.0 6.01	Layanan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Bencana	Menyampaikan informasi terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Elektronik	Peningkatan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENANGGULANGAN BENCANA
ME-DAL.01.26.0 6.02	Layanan Penanggulangan Bencana	Memberikan Bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Non Elektronik	Penanggulangan Bencana	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENANGGULANGAN BENCANA
ME-DAL.01.27.0 1	Layanan Konsultasi Keluarga	Memberikan layanan konsultasi untuk keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non Elektronik	Peningkatan Kualitas Keluarga	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.01 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.27.02	Layanan Pemberdayaan Perempuan	Untuk mendorong Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Muara Enim di Bidang Politik, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non Elektronik	Pemberdayaan Perempuan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ME-DAL.01.27.03	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Untuk mendukung Organisasi perangkat daerah menerapkan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Non Elektronik	Pengarusutamaan Gender	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.03 KESETARAAN GENDER
ME-DAL.01.27.03	Layanan Fasilitasi Penginputan Data Gender dan Anak	Memberikan layanan konsultasi untuk perangkat daerah terkait menginput data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.03 KESETARAAN GENDER

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.27.0 4.01	Layanan Pembinaan Lembaga pelayanan anak	Untuk mengetahui jumlah lembaga yang melayani anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	RAL.01.27.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAL.01.27.0 4.02	Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Anak	Untuk mengetahui Laporan Kasus dan Cara Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Perlindungan Khusus Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	RAL.01.27.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAL.01.27.0 4.03	Layanan Konsultasi kasus kekerasan terhadap Anak	Untuk mengetahui Laporan Kasus dan Cara Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Perlindungan Khusus Anak	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	RAL.01.27.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAL.01.27.0 5.01	Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan	Untuk mengetahui Laporan Kasus dan Cara Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Perlindungan Perempuan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	RAL.01.27.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.27.0 5.01	Layanan Konsultasi kasus kekerasan terhadap perempuan	Untuk mengetahui Laporan Kasus dan Cara Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Elektronik	Perlindungan Perempuan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ME-DAL.01.28.0 1.01	Layanan Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Memberikan Fasilitasi dan konsultasi terkait Penyusunan Produk Hukum	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01 PENYELENGGA RAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ME-DAL.01.28.0 1.02	Layanan Publikasi Peraturan Perundangan di Daerah	Memberikan informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh legislator	Sekretariat Dewan	Elektronik	Pengesahan Peraturan Perundangan di Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01 PENYELENGGA RAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ME-DAL.01.28.0 2	Layanan Konsultasi Bantuan Hukum	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Progam Bantuan Hukum Gratis	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemberian Bantuan Hukum Gratis	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 PENGELOLAAN PEMASYARAKATAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.29.0 3.01	Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Memberikan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran (termasuk orang hanyut tenggelam, evakuasi sarang tawon, evakuasi pohon tumbang, evakuasi orang hanyut tenggelam dan lain-lain)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Non Elektronik	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.0 3.02	Layanan Pencegahan Pelayanan Publik Bidang Kebakaran	Menyampaikan layanan informasi terkait pencegahan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Non Elektronik	Peningkatan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.0 3.03	Layanan penerbitan SKCK dan SKBD	Memberikan rekomendasi penerbitan SKCK dan SKBD	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.0 3.04	Layanan penerbitan Surat Izin Keramaian	Memberikan rekomendasi	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		penerbitan Surat Izin Keramaian			dan Pelayanan Publik			KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.03.05	Layanan rekomendasi izin keramaian	Memberikan rekomendasi penerbitan Surat Izin Keramaian	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.03.06	Layanan penerbitan SKCK dan SKBD	Memberikan rekomendasi penerbitan SKCK dan SKBD	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.03.07	Layanan penerbitan SKCK dan SKBD	Memberikan rekomendasi penerbitan SKCK dan SKBD	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.03.08	Layanan penerbitan Surat Izin Keramaian	Memberikan rekomendasi penerbitan Surat Izin Keramaian	Kecamatan	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.29.0 3.09	Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan kegiatan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan dan pengamanan serta penertiban di lingkungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Non Elektronik	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.29.0 3.10	Layanan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Melaksanakan kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Non Elektronik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ME-DAL.01.30.0 2	Layanan pendaftaran, konsultasi dan asistensi hak kekayaan intelektual	Memudahkan pendaftaran pendataan hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pemohon	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Elektronik	Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.30 HAK ASASI MANUSIA	RAL.01.30.02 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.31.0 1.01	Layanan Tarik Data Peserta Didik (Mutasi dan Beda Jenjang)	Layanan proses perpindahan peserta didik pada jenjang PAUD, SD, SMP, dari satu sekolah ke sekolah lain baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.02	Layanan Surat keterangan penggantian STTB/Ijazah /DANEM/SKHU/SKYBS	Memberikan Dokumen Pengganti STTB/Ijazah/DAN EM/SKHU/SKYBS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Peningkatan Akses Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.03	Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum	Menjamin standar mutu sekolah Sebagai dasar acuan yang sah, agar sekolah dapat melaksanakan proses belajar mengajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Non Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.31.0 1.04	Layanan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional	Mengidentifikasi dan melacak data sekolah secara nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.05	Layanan Tunjangan Pendidik	Penyaluran Tunjangan Profesi Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Tenaga Pendidik	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.06	Layanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan	Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Pendirian atau Perpanjangan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengendalian Perizinan Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.31.01.07	Layanan Bidang Ketenagaan GTK	Menyusun kebijakan teknis dan operasional di bidang pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan/kebudayaan, penyusunan formasi kebutuhan tenaga guru dan kebudayaan, pembinaan disiplin aparatur sipil negara dan tenaga teknis kebudayaan, pemindahan dan pemerataan guru, koordinasi peningkatan kesejahteraan guru, pengelolaan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		kependidikan lainnya, koordinasi pembinaan karir tenaga guru dan kebudayaan, koordinasi pengembangan kemampuan kompetensi profesionalisme serta pelayanan administrasi kepegawaian kepada guru-guru dan tenaga teknis pendidikan dan kebudayaan.						
ME-DAL.01.31.01.08	Layanan Tambah PTK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.01.09	Layanan Perubahan Data PTK		Dinas Pendidikan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			dan Kebudayaan		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PEMERINTAH AN		TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.10	Layanan Konfirmasi /Aproval PTK Mutasi / Tambah Jam / Kepsek PLT / Pengaktifan Kembali PTK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.11	Layanan Reset Password / Hapus Akun PTK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 1.12	Layanan Reset Akun Admin Dapodik / Ganti Operator Satuan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ME-DAL.01.31.0 3	Layanan Oprasional Sanggar Seni		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Non Elektronik	Pengembangan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.03 PENDIDIKAN NON-FORMAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.31.0 4.01	Layanan PPDB	Mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.02	Layanan User Baru Dapodik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.03	Layanan Pengajuan Registrasi Dapodik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.04	Layanan Konfirmasi / Approval Peserta Didik NON DAPODIK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
					Tenaga Kependidikan			
ME-DAL.01.31.0 4.05	Layanan Permohonan Pindah Rombel Peserta Didik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.06	Layanan Permohonan Pembatalan Kelulusan / Mutasi / Pengeluaran Paksa / Pengaktifan Kembali Peserta Didik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.07	Layanan Pengajuan NPSN Baru		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.31.0 4.08	Layanan Pengajuan NPYP Baru		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.31.04.09	Layanan Perubahan Data Satuan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Elektronik	Pengelolaan Pendidikan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.04 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAL.01.32.01.01	Layanan Penerbitan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja	Memberikan Layanan Agar Pencari Kerja terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan.	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIFITAS
ME-DAL.01.32.01.02	Layanan Penerbitan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja	Memberikan Layanan Agar Pencari Kerja terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan.	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIFITAS
ME-DAL.01.32.02.01	RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Layanan ini bertujuan untuk melaksanakan penertiban atau pendataan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan dalam satu wilayah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Non Elektronik	Penempatan Tenaga Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.32.0 2.02	Layanan Informasi Pencari Kerja	Proses bisnis ini menggambarkan upaya peningkatan kesempatan lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Elektronik	Penempatan Tenaga Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.0 2.03	Layanan Informasi Lowongan Kerja	untuk menempatkan para pencari kerja sesuai dengan lowongan kerja yang terdaftar di Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Elektronik	Penempatan Tenaga Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.0 2.04	Layanan Validasi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Layanan Validasi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk memudahkan dan memberikan pendataan yang tepat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Non Elektronik	Penempatan Tenaga Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.32.0 2.05	Layanan penerbitan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Memberikan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.0 2.06	Layanan penerbitan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Memberikan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.0 2.07	Layanan penerbitan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Memberikan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.0 2.08	Layanan penerbitan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Memberikan Kartu Kuning/ AK1 Pencari Kerja	Kecamatan	Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
								KESEMPATAN KERJA
ME-DAL.01.32.03	Layanan Mediasi	Layanan ini bertujuan untuk terlaksananya pembinaan dan mediasi hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Non Elektronik	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pekerja dan Pemberi Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.03 HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
ME-DAL.01.32.05.01	Layanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Layanan ini bertujuan untuk terlaksananya pendataan calon PMI yang akan bekerja di luar negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Non Elektronik	Pemberian Rekomendasi Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.05 PERENCANAAN KETENAGAKER JAAN NASIONAL
ME-DAL.01.32.05.02	Layanan Pelatihan bagi Pencari Kerja	untuk memberikan pelatihan kompetensi bagi pencari kerja (registrasi/seleksi dan pemagangan) khususnya untuk anak-anak lulusan SMA/SMK sederajat di	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Non Elektronik	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKER JAAN	RAL.01.32.05 PERENCANAAN KETENAGAKER JAAN NASIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Kabupaten Muara Enim]						
ME-DAL.01.32.0 5.03	Layanan pendaftaran, konsultasi dan asistensi inovasi daerah	Website digunakan untuk pemberian penghargaan bagi daerah yang telah menginputkan Indeks Inovasi Daerah untuk dilaporkan ke Kemendagri dan melihat evidence base dari masing-masing inovasi yang dilaporkan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Elektronik	Pemenuhan Indeks Inovasi Daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.05 PENGELOLAAN INVENSI DAN INOVASI
ME-DAL.01.34.0 3.01	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.03 PENGEMBANGAN PEMUDA
ME-DAL.01.34.0 3.02	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.mewujudkan pengembangan sistem informasi keolahragaan 2. meningkatkan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.03 PENGEMBANGAN PEMUDA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		pembinaan olahraga pelajar						
ME-DAL.01.34.0 3.03	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	meningkatkan kegiatan pelajar untuk mengikuti kegiatan pramuka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.03 PENGEMBANGAN PEMUDA
ME-DAL.01.40.0 1.01	Layanan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAL.01.40.0 1.02	Layanan Peningkatan Prasarana,Sarana	Menyediakan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Non Elektronik	Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Utilitas Umum (PSU)		Permukiman serta Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					HIDUP REGIONAL
ME-DAL.01.40.0 1.03	Layanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Mengetahui Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAL.01.40.0 1.04	Layanan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.40.0 1.05	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Memberikan penghargaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAL.01.40.0 2.01	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Menyediakan dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk Dokumen Kebijakan Rencana Program Tingkat Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAL.01.40.0 2.02	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Untuk konservasi tanaman endemik dan menciptakan iklim mikro	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAL.01.40.0 5.01	Layanan Pengelolaan Persampahan	Menyediakan sarana prasarana persampahan/ Angkutan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pengelolaan Persampahan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.40.0 5.02	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Menerima Pengaduan Masyarakat terhadap kasus-kasus pengrusakan/ pencemaran lingkungan yang dilaporkan	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAL.01.40.0 5.03	Layanan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa TPS 3R, Bank Sampah dan Rumah Pengomposan	Dinas Lingkungan Hidup	Elektronik	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAL.01.40.0 6.01	Layanan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Elektronik	Peningkatan Kualitas Lingkungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.40.0 6.02	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Mengetahui jumlah limbah B3 yang dikelola oleh penghasil limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAL.01.40.0 6.03	Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Mengetahui Kualitas Air di Kabupaten Muara Enim	Dinas Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAL.01.41.0 1	Layanan Pembinaan kepada kelompok agama tertentu	Untuk menciptakan zero konflik antar umat agama tertentu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Non Elektronik	Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.01 BIMBINGAN MASYARAKAT KEAGAMAAN
ME-DAL.01.42.0 4	Layanan Pendaftaran Warisan Tak Benda		Dinas Pendidikan	Non Elektronik	Pengembangan Kebudayaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.42.04 MANAJEMEN BUDAYA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			dan Kebudayaan					
ME- DAL.01.42.0 5	Layanan Perpustakaan	memberikan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka baik cetak maupun elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Elektronik	Pembinaan Perpustakaan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME- DAL.01.42.0 6	Layanan Pengelolaan Arsip Statis	pengelolaan arsip statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Elektronik	Pengelolaan Kearsipan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS
ME- DAL.01.43.0 2	Layanan Infromasi Statistik Sektoral	Layanan kepada masyarakat maupun instansi yang memerlukan terkait data statistik sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME- DAL.01.43.0 4.01	Layanan Informasi Daerah Rawan Pangan	Memberikan informasi status Daerah di Lihat dari tingkat Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Elektronik	Penanganan Kerawanan Pangan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.01.43.0 4.02	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Memberikan layanan pengaduan seputar pelayanan publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAL.01.43.0 4.03	Layanan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Memberikan bantuan bahan pangan kepada daerah rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Non Elektronik	Penanganan Kerawanan Pangan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAL.01.43.0 4.04	Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Publik	Layanan kepada publik yang memerlukan informasi tertentu dari badan publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAL.01.43.0 4.05	Layanan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintahan Daerah	Upaya diseminasi konten komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAL.01.43.0 4.06	Layanan Radio Siaran Pemerintah Daerah	Upaya diseminasi konten komunikasi publik yang dilakukan melalui radio	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.05 PENYIARAN RADIO PUBLIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.01.04.01	Layanan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Permasalahan Ketertiban Umum	Memberikan layanan fasilitas penyelesaian sengketa antara warga dan perusahaan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
ME-DAL.02.01.04.02	Layanan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah antar kabupaten dan antar kecamatan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
ME-DAL.02.02.03	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Fisik dan Non Fisik APBD Kabupaten Muara Enim	Layanan ini untuk menyusun laporan guna mengetahui realisasi kinerja fisik dan non fisik kabupaten Muara Enim setiap bulan sebagai bahan Bupati untuk pengambilan kebijakan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Perekonomian dan Pembangunan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 FISKAL
ME-DAL.02.02.05	Layanan SIPD Penganggaran	Sistem Informasi berbasis web yang bertujuan untuk	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.05 PENGANGGARAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		penganggaran APBD				PEMERINTAH AN		
ME-DAL.02.02.06.01	Layanan Penelusuran proses dokumen Pencairan Dana setelah masuk ke Loker BPKAD	Aplikasi monitoring Dokumen pencairan dana yang diajukan oleh SKPD setelah diserahkan ke loket BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAL.02.02.06.02	Layanan Manajemen Gaji	Aplikasi Manajemen Gaji ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAL.02.02.06.03	Layanan SIPD Perbendaharaan	Sistem Informasi berbasis web yang bertujuan untuk penganggaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAL.02.02.06.8	Layanan Manajemen Barang Milik Daerah	Aplikasi pengelolaan data Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.02.10	Layanan SIPD Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Informasi berbasis web yang bertujuan untuk menghasilkan data Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Elektronik	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ME-DAL.02.03.03	Layanan Perencanaan	layanan perencanaan berbasis teknologi yang dilakukan melalui sistem aplikasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK
ME-DAL.02.04.01.01	Layanan Pengendalian dan Monitoring	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Elektronik	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA	RAL.02.04.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAL.02.04.01.02	Layanan Konsultasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait terkait Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.0 1.03	Layanan Penyusunan dan Fasilitasi Laporan SAKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah	Melaksanakan penyusunan Laporan LAKIP dan fasilitasi penyusunan LAKIP bagi perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Elektronik	Fasilitasi SAKIP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAL.02.04.0 1.04	Layanan Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	Melaksanakan penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAL.02.04.0 1.05	Layanan Penyusunan TPP	Melaksanakan penyusunan kebijakan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai	Sekretariat Daerah	Elektronik	Penyusunan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAL.02.04.0 2.01	Layanan Konsultasi Kelembagaan dan Anjab	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Kelembagaan dan Anjab	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.0 2.02	Layanan Konsultasi Tata Laksana	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAL.02.04.0 2.03	Layanan Penataan Kelembagaan	Melaksanakan Penataan Kelembagaan di pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penataan Kelembagaan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAL.02.04.0 2.04	Layanan Konsultasi Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Penyusunan SOP	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Konsultasi Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAL.02.04.0 3.01	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin	Memberikan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin bagi ASN Lingkup Kabupaten Muara Enim yang akan mengajukan usulan untuk naik pangkat dan izin belajar	Inspektorat	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pengawasan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.0 3.02	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	Memberikan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi ASN Lingkup Kabupaten Muara Enim yang akan mengajukan usulan pindah tugas ke daerah lain	Inspektorat	Non Elektronik	Penyelenggaraan Pengawasan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.03	Layanan Konsultasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Sekretariat Daerah	Elektronik	Konsultasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.04	Layanan e-kinerja	Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	peningkatan kinerja pegawai	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.0 3.05	Layanan e-presensi	Untuk meningkatkan Kedisiplinan pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	Peningkatan disiplin kehadiran pegawai	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.06	Layanan Pensiun PNS	Agar layanan calon pensiun menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.07	Layanan kenaikan Pangkat	Agar layanan usul kepangkatan menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.08	Layanan Kenaikan Gaji berkala	Agar layanan usul kenaikan gaji berkala menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.0 3.09	Layanan peningkatan Ijazah	Agar layanan usul peningkatan ijazah menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.10	Layanan Mutasi	Agar layanan usul mutasi menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 3.11	Layanan penyesuaian Ijazah	Agar layanan usul penyesuaian ijazah menjadi lebih cepat, tepat dan transparan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non Elektronik	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN
ME-DAL.02.04.0 4.01	Layanan Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa	Digunakan untuk seleksi calon aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Elektronik		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.04.02	Layanan Izin Penelitian	Pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian membantu dalam memfasilitasi penelitian yang berkualitas, serta memastikan bahwa penelitian tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar etika dan keilmuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut juga dapat membantu peneliti mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Non Elektronik	Pengendalian Perizinan Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.04.04.03	Layanan Konsultasi Pelayanan Publik	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAL.02.04.04.04	Layanan Konsultasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Konsultasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAL.02.04.04.05	Layanan Fasilitasi Forum Konsultasi Publik	memfasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan forum konsultasi publik di Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Fasilitasi Forum Konsultasi Publik	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAL.02.04.04.06	Layanan Penyusunan Standar Pelayanan	Memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan Standar Pelayanan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.05.0 4.01	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan MCP KPK	Memfasilitasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan konsultasi penyusunan dan penginputan MCP KPK	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN
ME-DAL.02.05.0 4.02	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan SPIP	Memfasilitasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan konsultasi penyusunan dan penginputan SPIP	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN
ME-DAL.02.05.0 4.03	Layanan Konsultasi Penyusunan Sibijak	Memfasilitasi Pegawai Inspektorat Kab Muara Enim terkait penyusunan dan penginputan Sibijak	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.05.04.04	Layanan Penyusunan SIPP ASN	Memfasilitasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan konsultasi penyusunan dan penginputan SIPP	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN
ME-DAL.02.05.04.05	Layanan Konsultasi Penyusunan Kapabilitas APIP	Memfasilitasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan konsultasi penyusunan dan penginputan Evaluasi SAKIP	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN
ME-DAL.02.05.04.06	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan Sismonev	Sismonev ini disediakan oleh Kantor Staf Kepresidenan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi daerah dalam hal pengarusutamaan gender	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.05.04.07	Layanan Whistleblower System (WBS)	WBS ini disediakan ASN ataupun masyarakat umum yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun keluhan lainnya yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui wbs.muaraenimkab.go.id.	Inspektorat	Elektronik	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN
ME-DAL.02.05.06	Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis	pengelolaan arsip dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Elektronik	Pengelolaan Kearsipan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.02.05.06 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.06.0 1.01	Layanan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Memberikan layanan pengumpulan data dan informasi serta penginputan laporan capaian SPM setiap triwulan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.06.01 SISTEM PELAPORAN
ME-DAL.02.06.0 1.02	Layanan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Memberikan layanan pengumpulan data dan informasi serta penginputan LPPD dan LKPJ Tahunan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.06.01 SISTEM PELAPORAN
ME-DAL.02.06.0 3.01	Layanan Publikasi Produk Hukum Daerah	memberikan informasi data Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keutusan Bupati Muara Enim	Sekretariat Daerah	Elektronik	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	RAL.02.06.03 BANTUAN HUKUM
ME-DAL.02.06.0 3.02	Layanan Bantuan Hukum Gratis		Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pemberian Bantuan Hukum Gratis	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.02.06 DUKUNGAN	RAL.02.06.03 BANTUAN HUKUM

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						PEMERINTAH AN	OPERASIONAL ORGANISASI	
ME-DAL.02.06.0 3.03	Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	memfasilitasi penyusunan produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	RAL.02.06.03 BANTUAN HUKUM
ME-DAL.02.08.0 6.01	Layanan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Memfasilitasi Kegiatan pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, Dinas/Lembaga Vertikal dan Pihak Ketiga	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengelolaan Kerjasama Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA	RAL.02.08.06 KERJA SAMA ANTAR INSTANSI

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.08.06.02	Layanan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Memfasilitasi Kegiatan pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah / Lembaga / Pihak Ketiga Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengelolaan Kerjasama Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA	RAL.02.08.06 KERJA SAMA ANTAR INSTANSI
ME-DAL.02.08.06.03	Layanan Evaluasi Kerja Sama	Monitoring dan Evaluasi serta Administrasi pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Sekretariat Daerah	Non Elektronik	Pengelolaan Kerjasama Daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA	RAL.02.08.06 KERJA SAMA ANTAR INSTANSI
ME-DAL.02.09.01.01	Layanan Respon Insiden Keamanan Siber	Untuk memfasilitasi perangkat daerah lingkup kabupaten muara enim dalam melakukan respon insiden keamanan siber	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.0 1.02	Layanan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	menyediakan perangkat keras jaringan dan bandwidth internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Non Elektronik	Penyediaan Sarana Telekomunikasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
ME-DAL.02.09.0 1.03	Layanan Pemetaan Desa Lemah Sinyal dan Blankspot	memetakan wilayah desa lemah sinyal dan blankspot	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Penyediaan Sarana Telekomunikasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
ME-DAL.02.09.0 1.04	Layanan Penyediaan Data Center	menyediakan layanan data center terpadu	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Non Elektronik	Pengelolaan Aplikasi Informatika	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
ME-DAL.02.09.0 1.05	Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Memberikan tanda tangan elektronik sebagai upaya meningkatkan keamanan dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Non Elektronik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.02 PENYELENGGAAN INFORMATIKA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.0 1.06	Layanan Jaring Komunikasi Sandi	Merupakan layanan penerimaan surat masuk (email) dari instansi luar didukung fitur keamanan (enkripsi) untuk menjaga kerahasiaan data yang dikirim/diterima	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.02 PENYELENGGARAAN INFORMATIKA
ME-DAL.02.09.0 2.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan tata kelola e-government yang baik dan terintegrasiyang meningkatkan capaian keberhasilan bagi pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan	Dinas Ketahanan Pangan	Elektronik	Peningkatan efektifitas penggunaan sistem informasi daerah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.02 PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.02.02	Layanan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara dan menyebarkan informasi dan pengetahuan SPBE dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu/Unsur pemerintahan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Elektronik	Pengelolaan Aplikasi Informatika	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09.02 PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.0 3.01	Layanan Publikasi Produk Hukum Daerah	Memberikan Layanan Informasi regulasi Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum lainnya	Sekretariat Daerah	Elektronik	Pendokumentasi an Produk Hukum	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH AN	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
ME-DAL.02.09.0 3.02	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Layanan Pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Sekretariat Daerah	Elektronik	Perekonomian dan Pembangunan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH AN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH AN	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
ME-DAL.02.09.0 3.03	Layanan Pendaftaran dan Pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Memberikan Identitas usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.04	Layanan Pembayaran Pajak Hotel	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		pengelolaan Pajak Daerah.						
ME-DAL.02.09.0 3.05	Layanan Pembayaran Pajak Restoran	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.06	Layanan Pembayaran Pajak Hiburan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.07	Layanan Pembayaran Pajak Reklame	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.0 3.08	Layanan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.09	Layanan Pembayaran Pajak Parkir	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.10	Layanan Pembayaran Pajak Air Tanah	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.11	Layanan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

ID	Nama Layanan	Uraian/Deskripsi Layanan	→Unit Kerja (Dependency)	Metode Layanan	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
ME-DAL.02.09.0 3.12	Layanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.13	Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
ME-DAL.02.09.0 3.14	Layanan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	Pengelolaan pajak daerah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.02.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

2.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data dan informasi berfokus kepada identifikasi data dan informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan layanan yang terintegrasi. Identifikasi data dan informasi yang selaras dengan komponen-komponen lain dalam arsitektur SPBE akan memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (data sharing) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE.

Tabel 3. Domain Arsitektur Data dan Informasi (As-Is) Kabupaten Muara Enim

ID	Nama Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)
ME-DAD.02.01.01.01	Data Industri Tahap Pembangunan	Terbuka	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PEMBINAAN INDUSTRI REGIONAL
ME-DAD.02.01.01.02	Data perusahaan industri	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PEMBINAAN INDUSTRI REGIONAL
ME-DAD.02.01.01.03	Data Industri Tahap Produksi	Terbuka	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PEMBINAAN INDUSTRI REGIONAL
ME-DAD.02.01.02.01	Data peserta pelatihan pelaku IKM	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.02 PENUMBUH-KEMBANGAN INDUSTRI DALAM NEGERI
ME-DAD.02.02.02.01	Data Pasar Ramadhan	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.02.01 PEMBINAAN PERDAGANGAN REGIONAL

ME-DAD.02.02.02.02	Data Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, serta Penyidikan Metrologi Legal	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAD.02.02.02.03	Data Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Perbandingan Harga Barang Penting	Terbuka	Data Statistik	Harian	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAD.02.02.02.04	Data Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAD.02.02.02.05	Jumlah pasar rakyat	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN
ME-DAD.02.03.02.01	Produksi Padi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.02 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

ME-DAD.02.03.02.02	Produksi Tanaman Hortikultura	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.02 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
ME-DAD.02.03.03.01	Data Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.03 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
ME-DAD.02.03.04.01	Data Harga Komoditi Beras, Jagung dan Ubi Kayu	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.02	Peta SKPG Tahunan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.03	Data Luas Tanam dan Luas Puso Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.04	Data Penduduk	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.05	Data kuisisioner survey pola konsumsi	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.06	Data jumlah survey yang dilakukan	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN

ME-DAD.02.03.04.07	Data jumlah responden kuisioner survey pola konsumsi	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.08	Data nilai pola pangan harapan	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.09	Data Nama Komoditi Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.10	Data Jumlah Pedagang yang di survey	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.11	Data Lokasi Survey	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.12	Data Harga Komoditi Bahan Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.13	Data Ekspor dan Impor	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.14	Data Petugas Pengumpul Data	Terbatas	Data Lainnya	Tiga Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.15	Neraca Bahan Makanan	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.16	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN

ME-DAD.02.03.04.17	Data Komoditi Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.18	Data Harga Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.19	Tersedianya Bahan Pangan dengan harga pangan dibawah pasar	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.20	Data Nama Desa Rawan Pangan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.21	Data Rumah Tangga	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.22	Pemberian Bantuan Daerah Rawan Pangan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.23	Aplikasi Posting Cinta	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN
ME-DAD.02.03.04.24	Data Produksi	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN

						EKONOMI DAN INDUSTRI		
ME-DAD.02.03.05.01	Data Profil Produsen	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.05 PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
ME-DAD.02.03.05.02	Data Komoditi Pangan	Terbuka	Data Lainnya	Lima Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.05 PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
ME-DAD.02.03.05.03	Sertifikat dan Nomor Registrasi	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.05 PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
ME-DAD.02.04.02.01	Data jumlah petani tanaman kelapa sawit, karet dan kopi menurut kecamatan di kabupaten muara enim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN
ME-DAD.02.04.02.02	Luas areal tanaman perkebunan	Terbuka	Data Geospasial	Tahunan	Dinas perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN
ME-DAD.02.04.02.03	Data produktivitas tanaman kelapa sawit, karet dan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN

	kopi menurut kecamatan di kabupaten muara enim							
ME-DAD.02.04.02.04	Jumlah produksi hasil perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN
ME-DAD.02.04.02.05	Luas areal tanaman perkebunan rakyat	Terbuka	Data Geospasial	Tahunan	Dinas perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN
ME-DAD.02.04.04.01	Luas lahan Yang terserang Hama dan Penyakit Tanaman	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan		RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.04 PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
ME-DAD.02.05.02.01	populasi ternak yang di (Inseminasi Buatan) IB	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.02 BENIH DAN BIBIT TERNAK
ME-DAD.02.05.05.01	Populasi hewan ternak	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.05 PRODUKSI PAKAN DAN TERNAK
ME-DAD.02.05.05.02	Populasi hewan unggas	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.05 PRODUKSI PAKAN DAN TERNAK

ME-DAD.02.05.05.03	Produksi telur menurut jenis	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.05 PRODUKSI PAKAN DAN TERNAK
ME-DAD.02.06.03.01	Luas area perikanan tangkap	Terbuka	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAD.02.06.03.02	Produksi produk olahan ikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAD.02.06.03.03	Produksi ikan perairan darat	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAD.02.06.03.04	Surplus Minus Kebutuhan Ikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAD.02.06.03.05	Data Pengujian Produk Hasil Perikanan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
ME-DAD.02.06.04.01	Alat tangkap ikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN
ME-DAD.02.06.04.02	Jumlah nelayan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN

ME-DAD.02.06.04.03	Jumlah perahu	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN
ME-DAD.02.06.06.01	Produksi benih ikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAD.02.06.06.02	Luas area perikanan budidaya	Terbuka	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAD.02.06.06.03	Produksi perikanan budidaya	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAD.02.06.06.04	Data kesehatan ikan dan lingkungan perairan	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.06 PERIKANAN BUDIDAYA
ME-DAD.02.07.01.01	Laporan Tahunan BLUD	Terbatas	Data Keuangan	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.02.07 DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAD.02.07.01 PEMBINAAN BADAN USAHA REGIONAL
ME-DAD.02.07.01.02	Laporan Triwulan BUMD	Terbatas	Data Keuangan	Tiga Bulanan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.02.07 DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAD.02.07.01 PEMBINAAN BADAN USAHA REGIONAL
ME-DAD.02.07.01.03	Laporan Tahunan BUMD	Terbatas	Data Keuangan	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.02.07 DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAD.02.07.01 PEMBINAAN BADAN USAHA REGIONAL

ME-DAD.02.08.01.01	Data Laporan Rencana Kegiatan TPKAD	Terbuka	Data Lainnya	Enam Bulanan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.01 PEMBINAAN PENANAMAN MODAL REGIONAL
ME-DAD.02.08.02.01	Data potensi dan peluang investasi yang ada di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.02	Data Potensi Investasi Perkecamatan dan Persektor	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.03	Nilai Realisasi Investasi	Tertutup	Data Keuangan	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.04	Data Potensi dan Peluang Investasi Perkecamatan dan Persektor	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.05	Data Investasi/Penanaman Modal	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.06	Data Investasi/Penanaman Modal	Tertutup	Data Keuangan	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL

ME-DAD.02.08.02.07	Data Peluang & Potensi Investasi, Profil Kabupaten, Realisasi Investasi, Produk Hukum, UMKMK dan informasi lainnya terkait Investasi di Kabupaten Muara Enim	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.08	Data Potensi Investasi Perkecamatan dan Persektor	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.02.09	Data IKM Kabupaten Muara Enim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.01	Sertifikat Izin Terbit	Tertutup	Data Statistik	Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.02	Berkas Pengajuan Surat Izin	Tertutup	Data Statistik	Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

ME-DAD.02.08.03.03	Data Berkas Pengajuan Surat Izin	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.04	Rekapitulasi Perizinan dan Nonperizinan	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.05	Data Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui aplikasi SiCantik Cloud	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.06	Data Diri Pemohon, Perusahaan, serta Informasi Kegiatan Usaha	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.07	Data migrasi yang dapat diupload dari sistem OSS dalam bentuk PDF	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.08.03.08	Data Diri Pemohon, Perusahaan, serta Informasi Kegiatan Usaha	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

ME-DAD.02.08.03.09	Data migrasi yang dapat diupload dari sistem OSS dalam bentuk PDF	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
ME-DAD.02.09.01.01	Koperasi aktif dan tidak aktif	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAD.02.09.01.02	Jumlah koperasi menurut jenis	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAD.02.09.01.03	Data Keragaan Koperasi	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAD.02.09.01.04	Peta Sebaran Koperasi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAD.02.09.01.05	Data Koperasi Sehat	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
ME-DAD.02.10.01.01	Data Keragaan UMKM	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.01 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAD.02.10.03.01	Peta Sebaran UMKM	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.03 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN

						EKONOMI DAN INDUSTRI		PEMASARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ME-DAD.02.10.04.01	Data Calon Penerima KUR	Tertutup	Data Keuangan	Harian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.04 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ME-DAD.02.11.01.01	Jumlah Data Usaha Pariwisata Skala Mikro dan Kecil	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 DESTINASI PARIWISATA
ME-DAD.02.11.01.02	Jumlah rumah makan/Restoran	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 DESTINASI PARIWISATA
ME-DAD.02.11.01.03	Data objek wisata	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 DESTINASI PARIWISATA
ME-DAD.02.11.02.01	Data Promosi dan Pemasaran yang telah dilakukan	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAD.02.11.02.02	Data Media Sosial yg menjadi Promosi Pariwisata	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 PEMASARAN PARIWISATA
ME-DAD.02.11.03.01	Data Pelaku Usaha Ekonomi	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN

	Kreatif yang memiliki HaKI					EKONOMI DAN INDUSTRI		KELEMBAGAAN PARIWISATA
ME-DAD.02.11.03.02	Data Jenis HaKI yang dapat di daftar	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
ME-DAD.02.11.03.03	Data SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
ME-DAD.09.05.03.01.01	Layanan Informasi Perencanaan Infrastruktur	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
ME-DAD.03.03.02.01	Data masyarakat yang menggunakan layanan bus BRT	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perhubungan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN TRANSPORTASI
ME-DAD.03.03.02.02	Data Kendaran bermotor menurut jenis dan plat nomor kendaraan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN TRANSPORTASI
ME-DAD.03.03.02.03	Data Kendaraan yang sudah melakukan pengujian	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Perhubungan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN TRANSPORTASI
ME-DAD.03.03.04.01	Data kelengkapan Infrastuktur Jalan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perhubungan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.04 PENGELOLAAN SARANA DAN

								PRASARANA TRANSPORTASI
ME- DAD.03.03.04.02	Data Infrastruktur	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
ME- DAD.03.07.01.01	Jumlah Kepala Keluarga menurut kecamatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME- DAD.03.07.01.02	jumlah wajib KTP menurut kecamatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME- DAD.03.07.01.03	jumlah perekaman E-KTP menurut kecamatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME- DAD.03.07.01.04	Data Desa Kemiskinan Ekstrim	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL
ME- DAD.03.07.03.01	Data Kampung KB	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA
ME- DAD.03.07.03.02	Data Kelompok Sasaran	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA

ME-DAD.03.07.03.03	Data dan Informasi Keluarga Berencana	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA
ME-DAD.04.01.01.01	Laporan usulan DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan	Terbatas	Data Keuangan	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL
ME-DAD.04.01.01.02	Laporan Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan	Terbatas	Data Keuangan	Tiga Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL
ME-DAD.04.01.02.01	Jumlah sarana fasilitas kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
ME-DAD.04.01.02.02	Data Internal dan Data Eksternal Laboratorium Kesehatan	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
ME-DAD.04.01.02.03	Data ketersediaan obat	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
ME-DAD.04.01.02.04	Data sarana dan prasarana kesehatan	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan		RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

ME-DAD.04.01.03.01	Jumlah kasus 10 penyakit terbanyak	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.03.02	Laporan/pelayanan kegawatdaruratan yang ditangani	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.03.03	Data penyakit masalah kesehatan jiwa	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.03.04	Data kunjungan Posbindu PTM	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.03.05	Data imunisasi rutin, baduta dan WUS	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.03.06	Data kunjungan dan pelayanan pasien di puskesmas	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT

ME-DAD.04.01.03.07	Data pasien yang akan dirujuk di fasilitas layanan kesehatan (SISRUTE)	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT
ME-DAD.04.01.04.01	Jumlah tenaga kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN
ME-DAD.04.01.04.02	Data Kepegawaian Tenaga Kesehatan baik ASN maupun Non ASN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN
ME-DAD.04.01.04.03	Data perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN
ME-DAD.04.01.04.04	Data Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN
ME-DAD.04.01.05.01	Data pasien dan status kesehatan	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENGENDALIAN PENYAKIT

ME-DAD.04.02.01.01	Data Calon Anak Angkat	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.02	Data Calon Orang Tua Angkat	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.03	Laporan Calon Anak Angkat	Tertutup	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.04	Laporan Calon Orang Tua Angkat	Tertutup	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.05	Dokumentasi Pengajuan Klaim	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.06	Laporan Kematian	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.07	Jumlah Angka Kematian	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.08	Data Usulan LKS	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.09	Surat Rekomendasi LKS	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.10	Jumlah LKS yang ada di Kab. Muara Enim	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.11	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.12	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.13	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.14	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.15	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.16	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.17	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.18	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.19	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.20	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.21	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.22	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.23	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.24	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.25	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.26	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.27	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.28	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.29	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.30	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.31	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.32	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.33	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.34	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.35	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.36	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.37	Biodata ODGJ	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.38	Laporan Jumlah ODGJ yang Tertangani	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.39	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.40	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.41	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.42	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.43	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.44	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.45	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.46	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.47	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.48	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL

ME-DAD.04.02.01.49	Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.50	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.01.51	Usulan penerima Bansos PBI JKN	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL
ME-DAD.04.02.06.01	Data Bencana	Terbuka	Lainnya	Tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA
ME-DAD.04.02.06.02	Data Kebakaran	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA
ME-DAD.04.02.06.03	Data Anggota Relawan Kebakaran	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA

ME-DAD.04.03.02.01	Data Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ME-DAD.04.03.02.02	Data Organisasi Perempuan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ME-DAD.04.03.02.03	Data Organisasi Perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ME-DAD.04.03.03.01	Data OPD yang menerapkan Perencanaan Responsif Gender	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.03 KESETARAAN GENDER
ME-DAD.04.03.04.01	Data Jumlah Lembaga Pelayanan Anak	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAD.04.03.04.02	Data Kasus Kekerasan pada Anak	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK

ME-DAD.04.03.04.03	Data Profil Anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAD.04.03.04.04	Data Anak dan Data Lembaga yang melayani anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAD.04.03.04.05	Data pengaduan kekerasan Anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAD.04.03.04.06	Laporan Kasus kekerasan terhadap anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN ANAK
ME-DAD.04.03.05.01	Data Kasus Kekerasan pada Perempuan	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ME-DAD.04.03.05.02	Data pengaduan kekerasan Perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

ME-DAD.04.03.05.03	Laporan Kasus kekerasan terhadap perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ME-DAD.04.03.06.01	Data Angka Balita yang ditimbang	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.06 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK
ME-DAD.04.01.09	Data posyandu	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.10	Data Kader KAP (Komunikasi antar pribadi)	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.11	Data kegiatan Germas	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.12	Data Profil Dinas Kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.13	Data identitas dan kondisi pasien	Tertutup			Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	

						PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN		
ME- DAD.04.01.14	Data Kesehatan Pemeriksaan Tahap I	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME- DAD.04.01.15	Pembinaan Masa Tunggu	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME- DAD.04.01.16	Pemeriksaan Tahap II	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME- DAD.04.01.17	Pembinaan Masa Keberangkatan	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME- DAD.04.01.18	Data Vaksinasi Jemaah	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME- DAD.04.01.19	Data Daftar Obat Jemaah	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	

						SOSIAL DAN KESEHATAN		
ME-DAD.04.01.20	Data cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.21	Data hasil pengukuran, penimbangan dan pelayanan kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.22	Data Kematian maternal dan perinatal serta kronologisnya	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.23	Data pelayanan kesehatan ibu dan anak	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.24	Data penduduk dan keluarga	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.25	Data dasar puskesmas dan fasyankes lainnya	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	

ME-DAD.04.01.26	Data rumah sakit	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.27	Data jumlah tempat tidur	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.28	Data identitas rumah sakit	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.29	Data kunjungan dan penyakit di fasyankes	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.30	Data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.31	Data kompilasi pasien rawat inap	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.32	Data kompilasi penyakit/morbidit	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	

	as pasien rawat jalan					PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN		
ME-DAD.04.01.33	Informasi data-data kelolaan Program JKN-KIS di Kabupaten Muara Enim	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.34	Data kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.35	Data Pelayanan Kesehatan Bergerak	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.36	Data Fasilitas Kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.37	Data Pencapaian Pelayanan Kesehatan Primer	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.38	Data Sarana Prasarana Alat Kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	

						SOSIAL DAN KESEHATAN		
ME-DAD.04.01.39	Capaian Indikator Nasional Mutu	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.40	Kode registrasi fasyankes	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.41	Data Keselamatan Pasien di Fasyankes Nilai Indikator Keselamatan Pasien	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.42	Data limbah medis Puskesmas dan RS Pemerintah & Swasta dan fasyankes lainnya	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.04.01.43	Konsultasi diagnostik dan tata laksana perawatan pasien	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	
ME-DAD.06.01.01.01	Data anak sekolah yang	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Perhubungan	RAD.06 INFORMASI	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PEMBINAAN

	memanfaatkan program BUSEK					PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA		PENDIDIKAN REGIONAL
ME-DAD.06.01.02.01	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME-DAD.06.01.02.02	Data Peserta Didik Perusia Usia	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME-DAD.06.01.02.03	Data User Baru Dapodik	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME-DAD.06.01.02.04	Data Pokok Pendidikan	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN
ME-DAD.06.01.05.01	Data Peserta Didik (Mutasi dan Beda Jenjang)	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			RAD.06.01.05 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAD.06.01.05.02	Surat Rekomendasi Mutasi Siswa	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			RAD.06.01.05 PENDIDIKAN DASAR
ME-DAD.06.02.01.01	Data Peserta Pelatihan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.01 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIFITAS

ME-DAD.06.02.02.01	Daftar nama pekerja untuk direkomendasikan bekerja ke luar negeri kepada kantor imigrasi	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.02	Informasi Penempatan Tenaga Kerja	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.03	Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.04	Jumlah lowongan kerja yang terdaftar	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.05	Jumlah tenaga kerja asing menurut lapangan usaha	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.06	Jumlah perusahaan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN

	menurut jenis usaha					PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA		TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.02.07	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
ME-DAD.06.02.03.01	Data Aduan Kasus untuk Dilakukan Mediasi	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
ME-DAD.06.03.01.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.01 PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI REGIONAL
ME-DAD.06.03.09.01	Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.09 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
ME-DAD.07.02.02.01	Data Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Terbatas	Data Lainnya	Tiga Bulanan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.07.02 DATA ENERGI	RAD.07.02.02 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
ME-DAD.07.05.01.01	Data Layanan Pembinaan dan Pengawasan	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PEMBINAAN

	terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					SUMBER DAYA ALAM		LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAD.07.05.01.02	Data Perusahaan yang telah dilakukan Pengawasan				Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
ME-DAD.07.05.02.01	Data Karakteristik Wilayah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.02	Data Isu Pembangunan Berkelanjutan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.03	Data Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.04	Data Perusahaan yang memiliki Sengketa Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

ME-DAD.07.05.02.05	Data Masyarakat Hukum Adat	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.06	Data Hutan Adat	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.07	Data Flora Endemik Kabupaten Muara Enim	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.08	Data Fauna Endemik Kabupaten Muara Enim	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.09	Data Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.10	Data Kalpataru	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

ME-DAD.07.05.02.11	Data Sekolah Adiwiyata yang dibina	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.12	Data Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.13	Data Isu Lingkungan Hidup Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.02.14	Data Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Terbatas	Data Geospasial	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
ME-DAD.07.05.04.01	Data Desain/gambar prasarana	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
ME-DAD.07.05.04.02	DED Masterplant	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

ME-DAD.07.05.04.03	Data Laporan Masyarakat Terkait Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
ME-DAD.07.05.04.04	Data Laporan Masyarakat Terkait Sumber Daya Alam	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
ME-DAD.07.05.05.01	Data Cakupan Pelayanan Persampahan	Terbuka	Data Statistik	Harian	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.05.02	Data sarana Prasarana Persampahan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.05.03	Data capaian kinerja pengelolaan sampah	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.05.04	Data Sarana dan Prasarana Persampahan	Terbuka	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH

						SUMBER DAYA ALAM		DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.05.05	Data Neraca Limbah B3	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.05.06	Persetujuan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ME-DAD.07.05.06.01	Data Status Mutu Air	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.02	Data Capaian Indeks Kualitas Air	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.03	Data Target Indeks Kualitas Air	Terbuka	Data Statistik	Tiga Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

ME-DAD.07.05.06.04	Data Capaian Indeks Kualitas Udara	Terbuka	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.05	Data Target Indeks Kualitas Udara	Terbuka	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.06	Data Capaian Indeks Kualitas Lahan	Terbatas	Data Geospasial	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.07	Data Target Indeks Kualitas Lahan	Terbatas	Data Geospasial	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.08	Data Rekapitulasi Invoice Laboratorium	Terbatas	Data Keuangan	Harian	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.07.05.06.09	Data Hasil Analisa Lingkungan	Terbatas	Data Statistik	Harian	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

ME-DAD.07.05.06.10	Surat Tanda Uji	Terbatas	Data Statistik	Harian	Dinas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ME-DAD.08.01.01.01	Data jumlah sosialisasi pembinaan kerukunan keagamaan yang terlaksana	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.01 BIMBINGAN MASYARAKAT KEAGAMAAN
ME-DAD.08.02.05.01	Data Bahan pustaka cetak dan elektronik	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME-DAD.08.02.05.02	Data penerbit buku	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME-DAD.08.02.05.03	buku bacaan	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME-DAD.08.02.05.04	judul buku bacaan	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN
ME-DAD.09.01.02.01	Data Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.02 KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

	dan Keputusan Sekretaris Daerah							
ME-DAD.09.01.02.02	Data Peraturan Daerah	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Dewan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.02 KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
ME-DAD.09.01.02.03	draft Rancangan peraturan daerah	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Dewan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.02 KEBIJAKAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
ME-DAD.09.01.06.01	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH
ME-DAD.09.01.07.01	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan perjanjian kerjasama	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.02	Data Jumlah Inovasi Pelayanan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.03	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL

ME-DAD.09.01.07.04	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.05	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.06	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.07	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.08	Jumlah Wajib KTP Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.09	Jumlah Wajib KTP Yang Sudah Rekam Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.10	Jumlah Kepemilikan KTP-El Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL

ME-DAD.09.01.07.11	Jumlah Kepemilikan KIA Menurut Kecamatan	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.12	Elemen Data Kependudukan	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.01.07.13	Data Jumlah Pengguna IKD	Terbatas	Data Statistik	Enam Bulanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL
ME-DAD.09.02.03.01	Dokumen kegiatan DAK Fisik	Terbatas	Data Keuangan	Realtime	Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 FISKAL
ME-DAD.09.02.03.02	Indeks Kapasitas Fisikal Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 FISKAL
ME-DAD.09.02.05.01	Data Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.05 PENGANGGARAN
ME-DAD.09.02.06.01	Data realisasi pendapatan pemerintah menurut jenis pendapatan	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAD.09.02.06.02	Data realisasi belanja pemerintah	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PERBENDAHARAAN

						PEMERINTAHAN UMUM		
ME-DAD.09.02.06.03	Data Posisi dokumen pada proses pencairan dana	Terbuka	Data Keuangan	Realtime	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAD.09.02.06.04	Data realisasi belanja pemerintah	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAD.09.02.06.05	Data Kepegawaian untuk penggajian	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PERBENDAHARAAN
ME-DAD.09.02.07.01	Data Angka Inflasi	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.02.07 MANAJEMEN EKONOMI MAKRO
ME-DAD.09.02.07.02	Data Perkembangan Harga Bahan Pangan	Terbuka	Data Statistik	Harian	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.02.07 MANAJEMEN EKONOMI MAKRO
ME-DAD.09.02.07.03	Data Upaya Kongkrit Pengendalian Inflasi	Terbuka	Data Statistik	Harian	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.02.07 MANAJEMEN EKONOMI MAKRO
ME-DAD.09.02.08.01	Data Barang Milik Daerah	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET

ME-DAD.09.02.08.02	Persyaratan lelang	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME-DAD.09.02.08.03	dokumen lelang	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME-DAD.09.02.08.04	dokumen HPS	Terbatas	Data Keuangan	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME-DAD.09.02.08.05	profile perusahaan peserta lelang	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME-DAD.09.02.08.06	dokumen penawaran lelang	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET
ME-DAD.09.02.08.07	Dokumen lelang	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET

ME-DAD.09.02.09.01	Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.02	Data Jumlah Wajib Pajak BPHTB	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.03	Data Jumlah Wajib Pajak Hotel	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.04	Data Jumlah Wajib Pajak Restoran	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.05	Data Jumlah Wajib Pajak Hiburan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.06	Data Jumlah Wajib Pajak Reklame	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.07	Data Jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.08	Data Jumlah Wajib Pajak Parkir	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK

ME-DAD.09.02.09.09	Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.10	Data Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.11	Data Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.12	Data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten muara enim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.13	Data realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kabupaten muara enim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK
ME-DAD.09.02.09.14	Data Realisasi Penerimaan dari 9 pajak daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK

ME-DAD.09.02.10.01	Opini Laporan Keuangan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ME-DAD.09.02.10.02	Data realisasi pendapatan pemerintah menurut jenis pendapatan	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ME-DAD.09.02.10.03	Data laporan keuangan pemerintah kabupaten muara enim	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ME-DAD.09.02.10.04	Realisasi Capaian Keuangan	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ME-DAD.09.03.01.01	Data berita SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.02	Data pengetahuan SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.03	Data manajemen pengetahuan SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA

ME-DAD.09.03.01.04	Data dokumen SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.05	Data publikasi dokumen SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.06	Data profile SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.07	Data hasil evaluasi SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.08	Data Indeks SPBE	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.09	Data hasil evaluasi mandiri SPBE	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.10	Data bukti dukung SPBE perangkat daerah	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.11	Tingkat kematangan indikator SPBE	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA

ME-DAD.09.03.01.12	Data pengguna jaringan intra pemerintah	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.13	Data history test jaringan internet	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.14	Data speed test jaringan internet	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.15	Data web test jaringan internet	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.16	Data multi test jaringan internet	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.17	Data video test jaringan internet	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.18	Jenis aduan insiden siber	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.19	Pelapor insiden siber	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA

ME-DAD.09.03.01.20	Tanggal kejadian insiden siber	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.01.21	Data laporan insiden siber	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA
ME-DAD.09.03.02.01	Data Perangkat Daerah Produsen Statistik Sektoral	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.02.02	Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.02.03	Data Jumlah Data Sektoral Perangkat Daerah	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.02.04	Data Jumlah Pengguna Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.02.05	Indeks Kemahalan Konstruksi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.02.06	Indeks Pembangunan Manusia	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

ME-DAD.09.03.02.07	Indeks Gini Rasio	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
ME-DAD.09.03.04.01	Data Pengaduan Pelayanan Publik	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.02	Data tindaklanjut Pengaduan Pelayanan Publik	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.03	Data Informasi Layanan Publik	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.04	Data Pengguna Informasi Layanan Publik	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.05	Pengaduan publik	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.06	Tindak lanjut pengaduan publik	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.07	Data liputan kegiatan pemerintahan	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

ME-DAD.09.03.04.08	Data bisnis portal pemerintah	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.09	Data profile portal pemerintah	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.10	Data fasilitas portal pemerintah	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.11	Pengumuman portal pemerintahan	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.12	Publikasi berita portal kegiatan pemerintahan	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.13	Publikasi data pendukung portal pemerintah	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.14	Surat Permohonan Konsultasi	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.15	Produk Hukum Daerah	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

ME-DAD.09.03.04.16	data jumlah aspirasi masyarakat	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.04.17	data aspirasi masyarakat	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Dewan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
ME-DAD.09.03.05.01	Data talkshow	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENYIARAN RADIO PUBLIK
ME-DAD.09.03.05.02	Data tema talkshow	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENYIARAN RADIO PUBLIK
ME-DAD.09.03.05.03	Data narasumber talkshow	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENYIARAN RADIO PUBLIK
ME-DAD.09.05.02.01	Indeks Kualitas Perencanaan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RAD.09.05.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK
ME-DAD.09.06.01.01	Dokumen Laporan RB	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PELAKSANAAN

						PEMERINTAHAN UMUM		REFORMASI BIROKRASI
ME-DAD.09.06.01.02	Indeks Reformasi Birokrasi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAD.09.06.02.00	Dokumen Perbup TPP	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ME-DAD.09.06.02.01	Dokumen Laporan SAKIP	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.02	Data rekapitulasi temuan	Tertutup	Data Lainnya	Harian	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.03	Data tuntutan ganti rugi	Tertutup	Data Lainnya	Bulanan	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.04	Data rekapitulasi aduan	Tertutup	Data Lainnya	Harian	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.05	Data pendampingan dan asistensi PD terkait SPIP	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.06	Data pendampingan	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS

	dan asistensi PD terkait SIPP					PEMERINTAHAN UMUM		APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.07	Data pendampingan dan asistensi Kapabilitas APIP	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.08	Data pendampingan dan asistensi Kapabilitas Sibijak	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.09	Data Laporan terkait Aduan melalui WBS	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.10	Data pendampingan dan asistensi Sismonev	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.02.11	Data pendampingan dan asistensi PD terkait MCP KPK	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Inspektorat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
ME-DAD.09.06.03.01.01	Data calon aparatur pemerintah desa	Terbatas	Data Statistik	Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAD.09.06.03.02.01	Dokumen draf SOP	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

ME-DAD.09.06.03.01.02	Dokumen Struktur Organisasi Tata Kerja	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAD.09.06.03.01	Nilai Prestasi Kerja	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAD.09.06.03.01.03	Nilai Penataan Perangkat Daerah	Terbatas	Data Lainnya	Dua Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
ME-DAD.09.06.04.01	Data Kepegawaian ASN	Terbuka	Data Statistik	Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD 09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.02	Absensi harian ASN	Terbuka	Data Lainnya	Harian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.03	Jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.04	Jumlah pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN

ME-DAD.09.06.04.05	Jumlah pegawai negeri sipil menurut tingkat kepangkatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.06	Informasi Jabatan	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.07	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.04.08	Dokumen Anjab dan ABK	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN
ME-DAD.09.06.05.01	Nilai Inovasi Daerah	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAD.09.06.05.02	Data Wilayah Blankspot dan sinyal lemah	Terbatas	Data Geopasial	Tahunan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAD.09.06.05.03	Dokumen rekomendasi Forum Konsultasi Publik	Terbatas	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAD.09.06.05.04	Dokumen Standar Pelayanan	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 MANAJEMEN

						PEMERINTAHAN UMUM		PELAYANAN PUBLIK
ME-DAD.09.06.05.05	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ME-DAD.09.07.05.02.01	Data Peserta Sosialisasi	Terbuka	Data Statistik	Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.05 KETAHANAN NEGARA
ME-DAD.09.07.05.02.02	Laporan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.05 KETAHANAN NEGARA
ME-DAD.09.07.06.01	Data informasi arsip dinamis	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.06 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS
ME-DAD.10.04.01	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Terbatas	Data Keuangan	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	
ME-DAD.10.04.02	Data rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	
ME-DAD.10.04.03	Data Desa yang tidak memiliki akses	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	

	penghubung memadai melalui darat atau air atau udara							
ME-DAD.10.04.04	data Rasio jumlah Rumah Tangga tanpa akses air bersih terhadap Jumlah Rumah Tangga Desa	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	
ME-DAD.10.04.05	Data Tinggi Badan Anak	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	
ME-DAD.10.04.06	Data Berat badan anak	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	
ME-DAD.10.03.01	Data jumlah dusun, RW dan RT menurut kecamatan di kabupaten muara enim	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.03 DATA KEWILAYAHAN	
ME-DAD.04.03.07	Data pengaduan keluarga				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
ME-DAD.04.03.08	Data Profil Gender				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

ME-DAD.10.02.01	Realisasi Capaian Kinerja	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Sekretariat Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	
ME-DAD.10.04.07	Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Sekretariat Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	

2.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Mengacu pada definisi dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, aplikasi SPBE adalah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Penyusunan Arsitektur aplikasi SPBE mengacu pada referensi Arsitektur Layanan SPBE dan domain Proses Bisnis. Berdasarkan referensi Arsitektur Layanan dan domain Proses Bisnis, Arsitektur Domain Layanan ini disusun berdasarkan kondisi saat ini (*as-is condition*) dimana untuk selanjutnya perlu disusun Arsitektur Domain Layanan target (*to-be*). Berikut ini adalah Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Muara Enim.

TABEL. 4 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.01.01	InaRISK	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana	Layanan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.02	Pusdalops PB (Pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana	Layanan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.03	DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia)	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana	Layanan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.04	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	RAD.05.03.02 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Layanan pendaftaran, konsultasi dan asistensi hak kekayaan intelektual	Masyarakat Umum/Pemohon HAKI	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.05	Telemedicine dan Konsultasi Medis Online (KOMEN)		Peningkatan Akses Kesehatan	Layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine)	Rumah sakit, Puskesmas dan Klinik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
	Kementerian Kesehatan						LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.06	PSC (Public Safety Center) 119 Kementerian Kesehatan		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan terhadap kejadian kegawatdaruratan kesehatan	Tim PSC 119	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.07	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR)	RAD.09.07.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat Umum	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.08	Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman dan Gempita (GIWANG SUMSEL)	RAL.01.15.02 PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata	Layanan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.09	OSS (Online Single Submission)	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.10	SIMANIS(PPDB Online	RAD.06.01.05 PENDIDIKAN DASAR	Pengelolaan Administrasi Siswa, Tenaga	Layanan PPDB		RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan				LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.11	Elsimil (Sistem Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.12	Ngekir Online			Layanan Penerbitan Bukti Pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.13	E-Learning Center (KUDAGANG)	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN	Penetapan Standar Ukur	Layanan pelaksanaan metrologi legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.14	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL	Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Layanan Pengolahan Ajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dinas Sosial	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.01.15	Panti Rakyat	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL	Pemberian Jaminan Sosial	Layanan Asuransi Kematian	Dinas Sosial	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.16	SIAP KERJA	RAD.06.02.02 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Penempatan Tenaga Kerja	Layanan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.01.17	SPSE	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET	Perekonomian dan Pembangunan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Sekretariat Daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK
ME-DAA.01.02.01	Indeks Inovasi Daerah/Inovation Government Award (IGA)	PENGLOLAAN INVENSI DAN INOVASI	Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah	Layanan pendaftaran, konsultasi dan asistensi inovasi daerah	Seluruh perangkat daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.02	Sistem Informasi Manajemen Daerah Aset (SIMDA ASET)	RAD.09.02.08 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN MANAJEMEN ASET	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Manajemen Barang Milik Daerah	Seluruh Unit Kerja	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.02.03	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI)	RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Layanan Manajemen Gaji	Seluruh Unit Kerja	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.04	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH, RAD.09.05.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK, RAD.09.05.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH,	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Perencanaan, Layanan SIPD Penganggaran, Layanan SIPD Perbendaharaan, Layanan SIPD Akuntansi dan Pelaporan	Seluruh Perangkat Daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.05	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL	Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Layanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Layanan Perjanjian Kerja Sama Perangkat	Kementrian Dalam Negeri	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
				Daerah dan Inovasi Pelayanan			
ME-DAA.01.02.06	BEnroll	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL	Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Kementrian Dalam Negeri	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.07	BCard	RAD.09.01.07 PENCATATAN SIPIL	Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Kementrian Dalam Negeri	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.08	Elektronik Puskesmas (ePuskesmas)		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.09	Komunikasi Data (Komdat) Kementerian Kesehatan		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.10	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Rumah Sakit	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.11	Rumah Sakit (RS) Online		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Rumah Sakit	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.12	Dashboard JKN Pemerintah Daerah		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Rumah sakit, Puskesmas dan Klinik dan BPJS Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.13	Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (Talkesmas)		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.14	Aplikasi Keluarga Sehat (IKS)		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.15	Registrasi Fasyankes		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan, Klinik, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.16	Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Fasyankes (RS, Klinik, Puskesmas, Lab, UTD dan TPMD/Dg	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.17	Indikator Nasional Mutu		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Fasyankes (RS, Klinik, Puskesmas, Lab, UTD dan TPMD/Dg	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.18	Indikator Keselamatan Pasien		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Fasyankes (RS, Klinik, Puskesmas, Lab, UTD dan TPMD/Dg	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.19	Data Fasyankes Online		Peningkatan Akses Kesehatan	Faslilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	RS, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium serta UTD	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.20	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis (SIKELIM)		Peningkatan Akses Kesehatan	Fasilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Puskesmas dan RS Pemerintah dan Swasta	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.21	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Kementerian Kesehatan	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Akses Kesehatan	Layanan Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, PSC 119	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.22	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) SKDR		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas dan klinik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.23	Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK)		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas dan klinik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.24	All record tc-19	RAD.04.01.05 PENGENDALIAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Dinas Kesehatan, Rumah sakit,	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
			Upaya Kesehatan Masyarakat		Puskesmas dan klinik		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.25	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.26	Sistem informasi Treking untuk transpotasi Spesimen (SITRUST)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.27	Elektronik TB (Etb) 12	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.28	Sistem informasi Hiv/aids (SIHA)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.29	Sistem informasi Hepatitis dan Infeksi saluran	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
	perencanaan (SIHEPI)		Upaya Kesehatan Masyarakat				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.30	Elektronik sistem informasi malaria (Esismal)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.31	Sistem informasi pengendalian vektor (SILANTOR)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.32	Siformasi Arbovirosis (SIARVI)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Puskesmas, klinik, rumah sakit, dinkes	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.33	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes Shar'i) Kemenkes RI		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pemeriksa Haji	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.34	Komunikasi Data (Komdat) Kementerian Kesehatan		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Layanan Kesehatan Primer	Puskesmas, Rumah Sakit, faskes swasta	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
			Upaya Kesehatan Masyarakat				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.35	Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Puskesmas, Rumah Sakit,	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.36	Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Puskesmas, Rumah Sakit, Faskes swasta, Bidan Desa	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.37	Elektronik Kohort (e-Kohort)		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Puskesmas, Rumah Sakit, Faskes swasta, Bidan Desa	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.38	SISDMK	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Lab Kesda, RS dan Faskes Swasta	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.39	Renbut 4.0	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN	Peningkatan Kapasitas Sumber	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan,	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
			Daya Manusia Kesehatan		Puskesmas, Lab Kesda dan RS		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.40	SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan)		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.41	PDGS	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kementerian Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.42	PDGIS	RAD.04.01.04 TENAGA KESEHATAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kementerian Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.43	Elektrik Perencanaan dan Penganggaran (Erenggar)		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan pembiayaan kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.44	Aplikasi Sarana Prasarana Alat	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan	Rumah Sakit , Puskesmas, Labkesda, Klinik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
	Kesehatan (ASPAK)		Makanan dan Minuman	pelaku sediaan makanan dan kefarmasian			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.45	eFarmasi	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan makanan dan kefarmasian	Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi), Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.46	SELENA (Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian)	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan makanan dan kefarmasian	Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.47	E-MONEV Obat (Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat)	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan makanan dan kefarmasian	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.48	SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika &	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan	Semua Unit Pelayanan (Apotek, Klinik & Rumah Sakit), Instalasi Farmasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
	Psikotropika Nasional)			makanan dan kefarmasian	Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota		
ME-DAA.01.02.49	SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Secara Elektronik)	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan makanan dan kefarmasian	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Polres, Rumah Sakit TNI (Rumkitban)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.50	ELogistik Obat	RAD.04.01.02 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Layanan pemberian rekomendasi surat izin tenaga kesehatan dan pelaku sediaan makanan dan kefarmasian	Dinas Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.51	Microsite Komdat Promkes	RAD.03.07.04 PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan pemantauan UKBM	Dinas Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.52	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	RAD.04.01.06 PENCEGAHAN PENYAKIT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.02.53	SIPEDULIE DILA		Peningkatan Akses Kesehatan	Fasilitas pemantauan layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit	Laboratorium Kesehatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.54	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA)	RAD.04.01.03 KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit	Dinas Kesehatan, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.55	CERIA		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Remaja Putri, Puskesmas	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.56	Kescatin		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Primer	Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten , Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.02.57	Tauval SPBE	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA	Peningkatan efektifitas penggunaan sistem informasi daerah	Layanan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.58	SIGMON	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA	Penyediaan Sarana Telekomunikasi	Layanan Pemetaan Desa Lemah Sinyal dan Blankspot	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.59	Online Data System (ODS)	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI	Perlindungan Koperasi	Layanan Pembinaan SDM Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.60	Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	RAD.02.10.04 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pemberdayaan UMKM	Layanan Bantuan Akses KUR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.61	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	RAD.07.05.06 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Layanan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.02.62	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Layanan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.63	Sistem Pemantauan Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP)	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Surveyor Dinas Perdagangan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.64	Sistem Pelaporan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan Daerah	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN	Penetapan Standar dan Perlindungan Konsumen	Layanan Penetapan Standar dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.65	Sistem Informasi Industri Nasional	RAD.02.01.02 PENUMBUH-KEMBANGAN INDUSTRI DALAM NEGERI	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.66	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	RAD.09.07.06 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS	Pengelolaan Kearsipan	Layanan Pengelolaan Kearsipan	Seluruh perangkat daerah	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
	Terintegrasi (SRIKANDI)						ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.67	Simon Balek Dalu Yan Kesal (Sistem Informasi Online Berbasis Aplikasi Data Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial)	RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL	Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Layanan Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.68	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Terintegrasi					RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.69	Aplikasi Penginputan Luas lahan, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan (SITAMPAN)					RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.70	ANJAB-ABK Kabupaten Muara Enim	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN	Konsultasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Layanan Konsultasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Perangkat Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.71	e-SAKIP Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Fasilitasi SAKIP	Layanan Penyusunan dan Fasilitasi Laporan SAKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME- DAA.01.02.72	SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) Kementerian Dalam Negeri	RAD.09.06.01 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Penyusunan Kebijakan Tambah Penghasilan Pegawai	Layanan Penyusunan TPP	Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.01.02.73	SP2KP	RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.74	Aplikasi PSR Online	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN	Pengendalian dan Penanggulangan bencana perkebunan	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan bencana perkebunan	Lembaga Pekebun (Koperasi, Gapoktan, Kelompok Tani, KEP)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.01.02.75	Aplikasi Saprasi Online	RAD.02.04.02 PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN	Penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan, Penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan	Layanan Penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan, Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan	Lembaga Pekebun (Koperasi, Gapoktan, Kelompok Tani, KEP)	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ME-DAA.02.02.01	MAMPIR BOS (Muara Enim Peluang Investasi Regional melalui Bedah Investasi Online Sistem)	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Terkait	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.02.02.02	Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud)	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif yang Dapat Menarik Minat Dunia Usaha untuk Melakukan Kegiatan Usaha	Layanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.03	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH SETWAN)	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	Pengesahan Peraturan Perundangan di Daerah	Layanan Publikasi Peraturan Perundangan di Daerah	Sekretariat Dewan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.04	Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan e-kinerja, Layanan e-presensi	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.05	E-Presensi	RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN	Peningkatan disiplin kehadiran pegawai	Layanan e-presensi	Seluruh perangkat daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.06	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	Pengelolaan pajak daerah	Layanan Tata Kelola Pemungutan Pajak PBB- P2 Secara Online	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.07	e-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	Pengelolaan pajak daerah	Layanan Tata Kelola Pemungutan Pajak BPHTB Secara Online	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.08	9Pajak Daerah Online	RAD.09.02.09 PENGELOLAAN PAJAK	Pengelolaan pajak daerah	Layanan Tata Kelola Pemungutan Pajak Daerah Secara Online	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.09	Sistem Informasi Layanan Perbendaharaan Online Muara Enim (SILPERLIME)	RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan Publik	Layanan Penelusuran proses dokumen Pencairan Dana setelah masuk ke Loker BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.10	Bank Data Infrastruktur	RAD.03.04.02 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur	Layanan Informasi Perencanaan Infrastruktur	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.11	E-SAKIP Kabupaten Muara Enim	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Peningkatan akuntabilitas kinerja Birokrasi	Layanan Inventarisasi dan Pengelolaan Data LAKIP	Seluruh perangkat daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							FUNGSI TERTENTU
ME- DAA.02.02.12	Pengatur Pola Konsumsi Pangan Bergizi dan Seimbang (POSTING CINTA)	RAD.04.03.06 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK			Tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME- DAA.02.02.13	Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SIMPAN) SPBE	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN INFORMATIKA	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME- DAA.02.02.14	Portal Kabupaten Muara Enim	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME- DAA.02.02.15	Muara Enim Center (MANCE)	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat Umum	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME- DAA.02.02.16	Radio Suara Muara Enim	RAD.09.03.05 PENYIARAN RADIO PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Radio Siaran Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika,	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
					Statistik dan Persandian		FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.17	Muara Enim CSIRT	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Respon Insiden Keamanan Siber	Perangkat Daerah	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.18	Sistem Informasi Statistik Sektoral Terpadu Berbasis TI (SISTER BETI)	RAD.09.03.02 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Informasi Statistik Sektoral	Seluruh Unit Kerja	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.19	Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Seluruh Unit Kerja	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.20	Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan UMKM (SIMKOPUKM)	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI	Pemberdayaan Koperasi	Layanan Informasi Manajemen Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.21	REDKAR	RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan Kebakaran	Layanan Pencegahan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
							FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.22	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGADP3A)	RAL.01.27.03 KESETARAAN GENDER	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Layanan Fasilitas Penginputan Data Gender	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.23	Sistem Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa (SIMPAPDES)	RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Layanan Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.24	WEB GIS (Website Berbasis Peta / Keruangan) Peluang Investasi	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.25	Bedah Investasi Muara Enim	RAD.02.08.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Promosi Investasi / Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.02.02.26	Sistem Informasi Cepat, Efisien, Responsif dan Berinteraksi (SICERDAS)	RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.27	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Online)	RAD.06.01.05 PENDIDIKAN DASAR , RAD.06.01.06 PENDIDIKAN MENENGAH	Peningkatan Pelayanan Publik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.28	New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Layanan Pengendalian Penduduk Layanan Pembinaan Keluarga Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.29	Kampung KB	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.02.02.30	SIPERINDU (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)	RAD.03.07.03 KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Layanan Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.31	Satudata-KKP	RAD.02.06.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL	Pengelolaan Data Perikanan	Layanan data statistik perikanan	Dinas Perikanan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.32	Muara Enim Digital Library (MEDALI)	RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.33	SIKN JKKN	RAD.08.02.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS	Pengelolaan Kearsipan	layanan pengelolaan kearsipan statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.34	Penilaian Kapabilitas APIP	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS	Perumusan kebijakan,	Layanan Konsultasi Penyusunan Kapabilitas APIP	Inspektorat	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
		APARATUR DAN PENGAWASAN	pendampingan dan Asistensi				FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.35	Jaga	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan MCP KPK	Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
ME-DAA.02.02.36	SPIP Terintegrasi	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan SPIP	Inspektorat	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.37	SIPP ASN	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Penyusunan SIPP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.38	Sibijak	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Konsultasi Penyusunan Sibijak	Inspektorat	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.39	Sismonev	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Konsultasi Penyusunan dan Penginputan Sismonev	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	→ Data yang digunakan - RAD Level 3 (Dependency) - Isikan RAD yang berelasi dengan aplikasi dimaksud	← Proses Bisnis (Dependency) - Isikan semua proses bisnis yang berkaitan	→ Layanan (Dependency)	→ Supplier Data (Dependency) - Merupakan identifikasi terhadap penghasil data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)
					Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat		
ME-DAA.02.02.40	Whistleblower System (WBS)	RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Layanan Whistleblower System (WBS)	Masyarakat Umum	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU
ME-DAA.02.02.41	Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAL.02.09.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Layanan Publikasi Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU

2.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan Arsitektur infrastruktur SPBE nasional. Arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Muara Enim disusun guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Muara Enim dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE nasional. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Muara Enim dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip berbagi pakai, interoperabilitas, dan efisien, sehingga di masa mendatang memungkinkan terhubung dengan infrastruktur SPBE nasional, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- 1) pusat komputasi dan data terpusat;
- 2) kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
- 3) penggunaan teknologi virtualisasi;
- 4) pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (*Hardware / Software / Netware*) secara optimal;
- 5) kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional; dan
- 6) dukungan terkait media jaringan yang beragam.

Seperti arsitektur SPBE yang lain, kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE juga terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE yang mengikuti pedoman dari arsitektur SPBE nasional. Untuk kondisi arsitektur saat ini pada domain infrastruktur adalah sebagai berikut:

2.5.1. Fasilitas Komputasi

1. Fasilitas Komputasi

- Arsitektur Infrastruktur Fasilitas Komputasi

TABEL 5. Tabel Arsitektur Infrastruktur Fasilitas Komputasi

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.FK.01.03.01	Muara Enim Command Center	170 Mbps		Kantor Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika		Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI
ME-DAI.FK.01.03.02	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	100 Mbps		Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tier 2	Non Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI
ME-DAI.FK.01.03.03	Network Operation Control 1 Pemerintah Kabupaten Muara Enim	170 Mbps		Kantor Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tier 2	Non Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI
ME-DAI.FK.	Network Operation Control 2	100 Mbps		Kantor Dinas Komunikasi	Sendiri	Dinas Komunikasi	Tier 2	Non Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
01.03.04	Pemerintah Kabupaten Muara Enim			dan Informatika		dan Informatika				
ME-DAI.FK.01.03.05	Ruang Pusat Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Mbps		Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI
ME-DAI.FK.01.03.06	Ruang Pusat Data Badan Pendapatan Daerah	20 Mbps		Kantor Badan Pendapatan Daerah	Sendiri	Badan Pendapatan Daerah		Non Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI
ME-DAI.FK.01.03.07	Ruang Pusat Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Mbps		Kantor Badan Pendapatan Daerah	Sendiri	Badan Pendapatan Daerah		Non Biometrik	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.03.PUS AT KENDALI

2.5.2. Sistem Integrasi

- **Arsitektur Infrastruktur Jaringan Intrapemerintah**

TABEL 6. Tabel Arsitektur Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.01	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Belida Darat	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Belida Darat	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.02	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Belimbing	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Belimbing	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.03	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Benakat	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Benakat	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.04	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Empat Petulai Dangku	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Empat Petulai Dangku	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DALJI P.02.01.05	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Gelumbang	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Gelumbang	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.06	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.07	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Kelekar	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Kelekar	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.08	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Lawang Kidul	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Lawang Kidul	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.09	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Lembak	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Lembak	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.10	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Lubai	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Lubai	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.11	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Lubai Ulu	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Lubai Ulu	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.12	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Muara Belida	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Muara Belida	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.13	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.14	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Panang Enim	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Panang Enim	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI	Jaringan Unit Kerja	Jaringan internet Unit Kerja	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia	Dinas Komunikasi	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
P.02.01.15	Kecamatan Rambang	Kecamatan Rambang			Comnets Plus	dan Informatika					PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.16	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Rambang Niru	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Rambang Niru	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.17	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Laut	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Laut	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.18	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Tengah	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Tengah	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.19	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Ulu	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Ulu	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DALJI P.02.01.20	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Sungai Rotan	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Sungai Rotan	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.21	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Tanjung Agung	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Tanjung Agung	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.22	Jaringan Unit Kerja Kecamatan Ujan Mas	Jaringan internet Unit Kerja Kecamatan Ujan Mas	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Indonesia Comnets Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.23	Jaringan Sekretariat Daerah	Jaringan internet sekretaris daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	170 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.24	Jaringan Unit Kerja Inspektorat	Jaringan internet Unit Kerja Inspektorat	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.25	Jaringan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jaringan internet Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	40 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.26	Jaringan Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jaringan internet Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.27	Jaringan Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah	Jaringan internet Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	40 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.28	Jaringan Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jaringan internet Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.29	Jaringan Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jaringan internet Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.30	Jaringan Unit Kerja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jaringan internet Unit Kerja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.31	Jaringan Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jaringan internet Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.32	Jaringan Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.JI P.02.01.33	Jaringan Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.34	Jaringan Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.35	Jaringan Unit Kerja Dinas Kesehatan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Kesehatan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.36	Jaringan Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.37	Jaringan Unit Kerja Dinas Koperasi,	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Koperasi,	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Kecil dan Menengah			Informatika						PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.38	Jaringan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.39	Jaringan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.40	Jaringan Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DALJI P.02.01.41	Jaringan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terpadu Satu Pintu									
ME-DAL.JI P.02.01.42	Jaringan Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.43	Jaringan Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.44	Jaringan Unit Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.45	Jaringan Unit Dnas Perkebunan	Jaringan internet Unit Kerja Dnas Perkebunan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
					Informatika						PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.46	Jaringan Unit Dinas Sosial	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Sosial	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.47	Jaringan Unit Dinas Ketenagakerjaan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Ketenagakerjaan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.48	Jaringan Unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.49	Jaringan Unit Satuan Polisi Pamong Praja	Jaringan internet Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.50	Jaringan Unit Dinas Pemadam Kebakaran	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pemadam	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	dan Penyelamatan	Kebakaran dan Penyelamatan			Informatika						PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.51	Jaringan Unit Dinas Perikanan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Perikanan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.52	Jaringan Unit Dinas Ketahanan Pangan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.53	Jaringan Unit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.54	Jaringan Unit Dinas Pehubungan	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pehubungan	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.55	Jaringan Unit Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.56	Jaringan Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jaringan internet Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.57	Jaringan Unit Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.58	Jaringan Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Intranet	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.59	Jaringan Internet Desa Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.60	Jaringan Internet Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.61	Jaringan Internet Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.62	Jaringan Internet Desa Kayuara	Jaringan internet yang difungsikan untuk	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	Batu Kecamatan Muara Belida	mengatasi wilayah BlankSpot									PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.63	Jaringan Internet Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.64	Jaringan Internet Aur Duri Kecamatan Rambang Niru	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAI.JI P.02.01.65	Jaringan Internet Air Limau Kecamatan Rambang Niru	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.66	Jaringan Internet Desa Tanjung Agung Semende Darat Ulu	Jaringan internet yang difungsikan untuk mengatasi wilayah BlankSpot	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.67	Jaringan Internet Objek Wisata Kampung Malaka Desa Kertamulya Kecamatan Gelumbang	Jaringan internet yang difungsikan untuk menunjang kegiatan pariwisata	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
ME-DAL.JI P.02.01.68	Jaringan Internet Objek Wisata Betung Berseri Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang	Jaringan internet yang difungsikan untuk menunjang kegiatan pariwisata	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAL.JI P.02.01.69	Jaringan Internet Objek Wisata Air Terjun Bedegung Desa Bedegung Kecamatan Panang Enim	Jaringan internet yang difungsikan untuk menunjang kegiatan pariwisata	Intranet	Pihak Ketiga	PT. Sriwijaya Internet Service	PT. Sriwijaya Internet Service	Up to 20 Mbps Kuota 200 GB	VSAT		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

2.5.3. Platform

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Keras Jaringan)**

Tabel 7. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.01	Router Unit Kerja Kecamatan Belida Darat	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Belida Darat	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.02	Router Unit Kerja Kecamatan Belimbing	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Belimbing	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.03	Router Unit Kerja Kecamatan Benakat	Perangkat router untuk jaringan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Benakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
		internet unit kerja kecamatan						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.04	Router Unit Kerja Kecamatan Empat Petulai Dangku	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Empat Petulai Dangku	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.05	Router Unit Kerja Kecamatan Gelumbang	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Gelumbang	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.06	Router Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.07	Router Unit Kerja Kecamatan Kelekar	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Kelekar	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.08	Router Unit Kerja Kecamatan Lawang Kidul	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Lawang Kidul	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.09	Router Unit Kerja Kecamatan Lembak	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Lembak	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.10	Router Unit Kerja Kecamatan Lubai	Perangkat router untuk jaringan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Lubai	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
		internet unit kerja kecamatan						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.11	Router Unit Kerja Kecamatan Lubai Ulu	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Lubai Ulu	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.12	Router Unit Kerja Kecamatan Muara Belida	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Muara Belida	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.13	Router Unit Kerja Kecamatan Panang Enim	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Panang Enim	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.14	Router Unit Kerja Kecamatan Rambang	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Rambang	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.15	Router Unit Kerja Kecamatan Rambang Niru	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Rambang Niru	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.16	Router Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Laut	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Laut	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.17	Router Unit Kerja Kecamatan Semende	Perangkat router untuk jaringan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Semende	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Darat Tengah	internet unit kerja kecamatan			Darat Tengah			UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01 .18	Router Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Ulu	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Semende Darat Ulu	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .19	Router Unit Kerja Kecamatan Sungai Rotan	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Sungai Rotan	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .20	Router Unit Kerja Kecamatan Tanjung Agung	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Tanjung Agung	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.21	Router Unit Kerja Kecamatan Ujan Mas	Perangkat router untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Router	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Ujan Mas	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.22	Converter Fiber Optic Router Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Perangkat keras jaringan unit kerja kecamatan muara enim	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.23	Switch Hub Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Perangkat switch hub untuk jaringan internet unit kerja kecamatan	Multilayer Switch	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Gunung Megang	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.24	Switch Hub Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Perangkat switch hub untuk jaringan	Multilayer Switch	Sendiri	Unit Kerja Kecamatan Muara Enim	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
		internet unit kerja kecamatan						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.25	Converter Fiber Optic Sekretariat Daerah	Perangkat keras jaringan Sekretariat Daerah	Transmission Equipment	Sendiri	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.26	Router Sekretariat Daerah	Perangkat keras jaringan Sekretariat Daerah	Router	Sendiri	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.27	Wireless Router Sekretariat Daerah	Perangkat keras jaringan Sekretariat Daerah	Wireless Equipment	Sendiri	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Switch Hub Sekretariat Daerah	Perangkat keras jaringan	Multilayer Switch	Sendiri	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.28		Sekretariat Daerah				i dan Informatika		UR DAN APLIKASI		Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.29	Switch Management Sekretariat Daerah	Perangkat keras jaringan Sekretariat Daerah	Multilayer Switch	Sendiri	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.30	Router Unit Kerja Inspektorat	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.31	Converter Fiber Optic Unit Kerja Inspektorat	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Patch Score Unit Kerja Inspektorat	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.32		unit kerja terkait				i dan Informatika		UR DAN APLIKASI		Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.33	Router Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.34	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.35	Router Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Converter Fiber Optic	Perangkat keras	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA		Network Operation	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.36	Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	jaringan unit kerja terkait				i dan Informatika		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.37	Patch Score Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.38	Optical Distribution Frame Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.39	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Pendapatan Daerah	unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.40	Patch Score Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.41	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.42	Cloud Core Router Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Router Unit Kerja Badan Penelitian	Perangkat keras jaringan	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.43	dan Pengembangan Daerah	unit kerja terkait				i dan Informatika		UR DAN APLIKASI		Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.44	Patch Score Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.45	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.46	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan Penelitian dan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Pengembangan Daerah										
ME-DAI.PK J.03.01.47	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.48	Wireless Router Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.49	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .50	Switch Hub Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Multilayer Switch	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .51	Converter Fiber Optic Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .52	Patch Score Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Switch Unit Kerja Badan Penanggulangan	Perangkat keras jaringan	Switch L2	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.53	gan Bencana Daerah	unit kerja terkait				i dan Informatika		UR DAN APLIKASI		Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.54	Router Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.55	Converter Fiber Optic Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.56	Router Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.57	Converter Fiber Optic Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.58	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.59	Router Unit Kerja Dinas Kesehatan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.60	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Kesehatan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
										Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.61	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Kesehatan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.62	Patch Score Unit Kerja Dinas Kesehatan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.63	Router Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.64	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01 .65	Patch Score Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .66	Router Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .67	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.68	Patch Score Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.69	Router Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.70	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.71	Patch Score Unit Kerja Dinas Pekerjaan	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Umum dan Penataan Ruang	unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.72	Router Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.73	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.74	Patch Score Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .75	Router Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .76	Patch Score Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .77	Converter Fiber Optic Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.78	Router Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.79	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.80	Patch Score Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.81	Router Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
										Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01 .82	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .83	Patch Score Unit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .84	Router Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .85	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .86	Patch Score Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .87	Router Unit Kerja Dnas Perkebunan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .88	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dnas Perkebunan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .89	Patch Score Unit Kerja Dnas Perkebunan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .90	Router Unit Kerja Dinas Sosial	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAL.PK J.03.01 .91	Converter Fiber Optic Unit Kerja Dinas Sosial	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .92	Switch Hub Unit Kerja Dinas Sosial	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Multilayer Switch	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .93	Patch Score Unit Kerja Dinas Sosial	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .94	Router Unit Kerja Dinas Ketenagakerjaan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .95	Router Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01.96	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.97	Patch Score Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.98	Router Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.99	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Satuan Polisi	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Pamong Praja									Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.100	Patch Score Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.101	Router Unit Kerja Dinas Perikanan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.102	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Perikanan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.103	Patch Score Unit Kerja Dinas Perikanan	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
		unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.104	Router Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.105	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.106	Patch Score Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK	Router Unit Kerja Dinas Perumahan	Perangkat keras jaringan	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
J.03.01.107	dan Kawasan Permukiman	unit kerja terkait				i dan Informatika		UR DAN APLIKASI		Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.108	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.109	Patch Score Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.110	Router Unit Kerja Dinas Pehubungan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .111	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pehubungan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .112	Patch Score Unit Kerja Dinas Pehubungan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .113	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Pehubungan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .114	Router Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
ME-DAI.PK J.03.01 .115	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .116	Patch Score Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01 .117	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Keluarga Berencana										
ME-DAI.PK J.03.01.118	Router Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.119	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.120	Patch Score Unit Kerja Dinas Pemberdayaan	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	an Perempuan dan Perlindungan Anak	unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.121	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.122	Router Unit Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.123	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja	Perangkat keras jaringan	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	unit kerja terkait						UR DAN APLIKASI		Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.124	Patch Score Unit Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.125	Switch Wireless Unit Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Wireless Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.126	Router Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Router	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah	Winbox

ID	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)
	Rakyat Daerah									Kabupaten Muara Enim	
ME-DAI.PK J.03.01.127	Small Form-factor Pluggable Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox
ME-DAI.PK J.03.01.128	Patch Score Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perangkat keras jaringan unit kerja terkait	Transmission Equipment	Sendiri	Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Winbox

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Keras Keamanan)**

Tabel 8. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)
ME-DAI.PKK.0 3.01.01	Firewall Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Perangkat keamanan yang difungsikan untuk keamanan jaringan intra pemerintah kabupaten muara enim	Firewall	Sendiri	PT. Lintas Arta	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		Network Operation Control 2 Pemerintah Kabupaten Muara Enim

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Keras Media Penyimpan)**

Tabel 9. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Keras Media Penyimpanan

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	← Data dan Informasi (Dependency)	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	← Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PK MP.01.02.01	NAS Storage	Perangkat penyimpanan khusus file yang membuat data tersedia secara berkelanjutan		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika				Network Attached Storage (NAS)	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK MP.01.02.02	Network Video Recorder (NVR)			Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			12 Terabyte	Network Attached Storage (NAS)	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Keras Periferal)**

Tabel 10. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Keras Periferal

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.01	Komputer Desktop Karlyn	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Subkoordinator Tata kelola E-Government a.n Karlyn	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.02	Laptop ASUS Penyelenggaraan E-Government	Laptop merk ASUS ROG yang digunakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.03	Laptop ASUS Tatakelola	Laptop merk ASUS ROG yang digunakan oleh Subkoordinator Tata kelola E-Government	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.04	Laptop Apple Aplikasi	Laptop merk APPLE yang digunakan untuk operasional staf Bayu	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.05	Laptop HP Jaringan	Laptop merk APPLE yang digunakan untuk operasional subkoordinator jaringan	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.06	Laptop HP Tatakelola	Laptop merk APPLE yang digunakan untuk	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		operasional Tata kelola E-Government					Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.07	Laptop Lenovo Tatakelola	Laptop merk APPLE yang digunakan untuk operasional Tata kelola E-Government	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.08	Komputer Desktop Admin	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh admin Bidang Penyelenggaraan E-Government	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.09	Komputer Desktop Zulpadra	Komputer Desktop Merk DELL yang digunakan oleh Subkoordinator pengembangan dan pengelolaan aplikasi a.n Zulpadra	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.10	Komputer Desktop Kasubbag perencanaan Diskominfo	Komputer Desktop yang digunakan oleh Kasubbag perencanaan Diskominfo	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.11	Laptop Lenovo Jaringan	Laptop merk Lenovo yang digunakan oleh Subkoordinator Infrastruktur dan TIK	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.12	Fingerprint Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat absensi untuk pegawai ASN dan Non ASN di kantor dinas komunikasi dan informatika	Input	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.13	Scanner Zulpadra	Alat scanner dokumen merk Canon yang digunakan oleh Subkoordinator pengembangan dan pengelolaan aplikasi a.n Zulpadra	Input	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.14	Printer Karlyn	Alat printer dokumen merk canon yang digunakan oleh Subkoordinator Tata kelola E-Government a.n Karlyn	Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.15	Komputer Desktop Ruang Command Center Muara Enim	Komputer jenis desktop dengan merk DELL yang digunakan untuk mengoperasikan layar command center muara enim	Input/Output	Command Center Muara Enim	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.16	Komputer I Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Anita	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.17	Komputer II Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Lidya	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.18	Komputer III Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Rudi Hartono	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.19	Komputer IV Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Elyana	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.20	Komputer V Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Andreas Aditama Hutagoaol	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.21	Komputer VI Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Derman	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.22	Komputer VII Sekretariat Dinas	Komputer Desktop Merk ASUS yang digunakan oleh Pegawai bernama Desti	Input/Output	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	Komunikasi dan Informatika						
ME-DAI.PKP.03.0 1.23	Komputer Desktop Monalisa	Komputer yang digunakan oleh pegawai DPMPPTSP Muara Enim an. Monalisa H	Input/Output	Kantor DPMPPTSP Kab.Muara Enim	DPMPPTSP Kab.Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.24	Komputer Desktop Desi Mila Sari	Komputer yang digunakan oleh pegawai DPMPPTSP Muara Enim an. Desi MS	Input/Output	Kantor DPMPPTSP Kab.Muara Enim	DPMPPTSP Kab.Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.25	Printer Pebriani	Printer yang digunakan oleh pegawai DPMPPTSP Muara Enim an. Pebriani	Output	Kantor DPMPPTSP Kab.Muara Enim	DPMPPTSP Kab.Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.26	Printer Monalisa	Printer yang digunakan oleh pegawai DPMPPTSP Muara Enim an. Monalisa H	Output	Kantor DPMPPTSP Kab.Muara Enim	DPMPPTSP Kab.Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.27	Laptop Lenovo Bendahara	Laptop digunakan untuk bendahara aset	Input/Output	Kantor DPMPPTSP Kab.Muara Enim	DPMPPTSP Kab.Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.28	Komputer-Delia	Komputer yang digunakan oleh pegawai dinas satuan polisi pamong praja bernama delia	Input/Output	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.29	CCTV	MIKVISION	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.30	Fingerprint kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Alat absensi untuk pegawai ASN dan Non ASN di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Input	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.31	Printer I kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Printer yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merk Brother	Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.32	Printer II kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Printer yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merk Canon	Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.33	Faxmail	Faxmile yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merkPanasonic/ KX-FT987CX	Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.34	Komputer Desktop I	Komputer yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan	Input/Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		Pembangunan Daerah dengan merk Lenovo intel core i5					
ME-DAI.PKP.03.0 1.35	Komputer Desktop II	Komputer yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merk Lenovo intel core i5	Input/Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.36	Laptop I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	laptop yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merk Asus intel core i7-8565u	Input/Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.37	Laptop II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	laptop yang digunakan untuk kegiatan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan merk Acer intel core i5	Input/Output	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.38	PC LENOVO AIO C560	PC digunakan oleh bendahara pembantu bagian organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.39	Laptop Dell Latitude 3420	Laptop yang digunakan oleh pegawai bagian	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah					Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.40	Laptop Acer	Laptop yang digunakan oleh pegawai bagian organisasi Muara Enim	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.41	Printer EPSON L5110	Alat printer dokumen merk Epson yang digunakan oleh pegawai bagian organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.42	Printer HP SMART Tank	Alat printer dokumen merk HP yang digunakan oleh pegawai bagian organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.43	Printer EPSON L120	Alat printer dokumen merk Epson yang digunakan oleh pegawai bagian organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.44	Scanner Brother	Alat scanner dokumen merk Brother yang digunakan oleh pegawai di bagian organisasi Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.45	DESKTOP-D11NAMN	Komputer DESKTOP yang digunakan oleh pegawai Dinas Kependudukan	Input/Output	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		dan Pencatatan Sipil bernama YUHANA		Sipil Kab. Muara Enim	Sipil Kab. Muara Enim		Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.46	DESKTOP-ONE	Komputer DESKTOP yang digunakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama SETIAWAN	Input/Output	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.47	PC Asus	PC digunakan oleh bendahara pembantu bagian organisasi Muara Enim Sekretariat Daerah	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.48	Printer Epson L 120	Alat printer dokumen merk Epson yang digunakan oleh pegawai bagian kerja sama muara enim	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.49	PC Lenovo	Printer yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup bagian umum bernama Nira	Input/Output	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.50	PC Lenovo	PC yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup bagian Perencanaan bernama Fahrerozi	Input/Output	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.51	PC Lenovo	PC yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup bagian Keuangan bernama Evi	Input/Output	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.52	Printer Brother	Printer yang digunakan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup bagian umum bernama Nira	Input/Output	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.53	Laptop Asus	Laptop ini digunakan oleh pengelola Media Center Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, untuk menjalankan tugas-tugas desain grafis dan video editing yang berkaitan dengan penyebaran informasi seputar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Digunakan oleh staff bagian media center atas nama Topan	Input/Output	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.54	Scanner Epson	scanner ini merupakan salah satu perangkat penting yang digunakan oleh pengelola Media Center Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan scanner, kami dapat mengabadikan berbagai dokumen dan materi	Input	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		informasi terkait dengan Dinas Pendidikan, termasuk dokumen-dokumen resmi, brosur, gambar, dan materi-materi visual lainnya. Hal ini membantu dalam pemeliharaan arsip, pengeditan, serta penyebaran informasi yang berkualitas tinggi. Digunakan oleh staff bagian media center atas nama Topan & Junico					
ME-DAI.PKP.03.01.55	Printer Canon G2010	Printer Canon G2010 yang digunakan oleh staff bagian perencanaan atas nama Hidayah Syafitri merupakan alat yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas perencanaan dan administrasi.	Input/Output	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.01.56	Laptop Asus Zenbook	Laptop yang digunakan oleh pegawai bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim atas nama Yoan Nopriansyah	Input/Output	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.57	Printer Canon MP287	Printer Canon MP287 yang digunakan oleh staff bagian media center atas nama Topan & Junico.	Input/Output	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.58	Komputer Admin 1 JDIH bagian Hukum Setda	Komputer yang digunakan oleh pegawai pada Bagian Hukum Setda sebagai admin I JDIH Kabupaten Muara Enim	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.59	Komputer Admin 2 JDIH bagian Hukum Setda	Komputer yang digunakan oleh pegawai pada Bagian Hukum Setda sebagai admin II JDIH Kabupaten Muara Enim	Input/Output	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.60	Laptop			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.61	Komputer pegawai a/n Muhadi			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.62	Laptop DPKD 1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PKP.03.0 1.63	Laptop DPKD 2			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.64	Laptop DPKD 3			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.65	Laptop DPKD 4			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.66	Komputer Desktop DPKD 1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.67	Komputer Desktop DPKD 2			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.68	Komputer Desktop DPKD 3			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PKP.03.0 1.69	Komputer Desktop DPKD 4			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Keras Server)**

Tabel 11. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Keras Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PK S.01.02.01	Server JDIH	server aplikasi dari website Jaringan Data Informasi Hukum	Server Aplikasi	Sendiri	Bagian Hukum Setda	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Centos	16GB	1TB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.02	Server GISTARU	Server dari aplikasi Geographic Information System Tata Ruang	Server Aplikasi	Sendiri	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Windows Server 2019	64TB	4TB	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.03	Server SIMPEG	Server aplikasi dari website	Server Aplikasi	Sendiri	Badan Kepegawaian dan	Dinas Komunikasi dan	Ruang Pusat Data Pemerintah	Linux Min	16GB	1TB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memoiri	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		Sistem Manajemen Kepegawaian			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informatika	Kabupaten Muara Enim					KOMPUTASI	
ME-DAI.PK S.01.02.04	SQL Micro Service Pemerintah Kabupaten Muara Enim 1	Collocation Server	Server Database	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pihak ke-3	Jakarta	RHEL 9	64GB	3tb	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.05	WHM Server Pemerintah Kabupaten Muara Enim 2	Collocation Server	Domain Name Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pihak ke-3	Batam	whm	32	3tb	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.06	Mail Server Pemerintah Kabupaten	Server yang digunakan untuk email	Mail Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten	Zimbra	8GB	1TB	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	n Muara Enim						n Muara Enim						
ME-DAI.PK S.01.02.07	Server SIMREN	server aplikasi simrenbangda	Server Aplikasi	Sendiri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Centos	16GB	1TB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.08	Server VMWare		Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	VMWare Vsphere	64TB	4TB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.09	Server SIAK	server proxy dari aplikasi sistem informasi administrasi	Proxy	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ruang Pusat Data Dinas Kependudukan dan	Windows Server 2019	12 GB	300GB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
		kependudukan					Pencatatan Sipil						
ME-DAI.PK S.01.02.10	Server KTP Elektronik	Server KTP Elektronik	Server Aplikasi	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ruang Pusat Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Windows Server 2020	64 GB	1000GB	Non Raid	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.11	Server Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Server aplikasi inlislite perpustakaan digital	Server Aplikasi	Sendiri	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Ubuntu OS 20.04	64 GB RAM	2 TB	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI
ME-DAI.PK S.01.02.12	Superserver Supermicro aplikasi Sistem Manajem	Server aplikasi yang digunakan untuk aplikasi sistem manajem	Server Aplikasi	Sendiri	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Ruang Pusat Data Badan Pendapatan Daerah		64 GB	4 TB	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memoori	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	en Objek Pajak	en objek pajak (SISMIOP) dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah											
ME-DAL.PK S.01.02 .13	Superserver Supermicro aplikasi Sistem Manajemen Objek Pajak	Server aplikasi yang digunakan untuk aplikasi 9 pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah	Server Aplikasi	Sendiri	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Ruang Pusat Data Badan Pendapatan Daerah		65 GB	4 TB	Raid 1	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI

- **Arsitektur Infrastruktur (Perangkat Lunak Platform)**

Tabel 12. Tabel Arsitektur Infrastruktur Perangkat Lunak Platform

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi (diisi jika tipe perangkat lunak adalah sistem operasi)	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
ME-DAI.PLP.03.01.01	WinRar	Perangkat lunak yang digunakan untuk proses compression data/file	Sistem Utilitas		Kode Sumber Terbuka		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PLP.03.01.02	Windows OS	Perangkat lunak operasi sistem yang digunakan untuk menjalankan perangkat komputer	Sistem Operasi	Windows	Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PLP.03.01.03	Google Drive	Perangkat lunak yang digunakan untuk proses pencadangan (Backup) file	Sistem Utilitas		Kode Sumber Terbuka		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PLP.03.01.04	Microsoft SQL Server	Perangkat lunak database management system	Sistem Database		Kode Sumber Terbuka		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PLP.03.01.05	MySQL	Perangkat lunak database management system	Sistem Database		Kode Sumber Terbuka		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME-DAI.PLP.03.01.06	Linux OS	Perangkat lunak operasi sistem yang digunakan untuk menjalankan perangkat komputer	Sistem Operasi	Unix	Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ME- DAI.PLP. 03.01.07	PostgreSQL		Sistem Database		Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.08	Ccleaner	Perangkat lunak untuk melakukan pembersihan disc	Sistem Utilitas		Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.09	Avast Antivirus	Perangkat lunak	Sistem Utilitas		Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.10	Avira Antivirus	Perangkat lunak	Sistem Utilitas		Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.11	Server VMWare	Perangkat lunak	Sistem Database		Periodik		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.12	Adobe Cloud Services	Perangkat lunak	Sistem Database		Periodik	Adobe Inc	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.13	Winbox	sebuah aplikasi berbasis windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi mikrotik	Sistem Utilitas		Seumur Hidup	Mikrotik	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
ME- DAI.PLP. 03.01.14	Smadav	Aplikasi antivirus	Sistem Utilitas		Seumur Hidup		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

2.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Mengacu pada definisi dalam Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE mengacu pada referensi Arsitektur Layanan SPBE dan domain Proses Bisnis. Berdasarkan referensi Arsitektur Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan, Arsitektur Domain Layanan ini disusun berdasarkan kondisi saat ini (as-is condition) dimana untuk selanjutnya perlu disusun Arsitektur Domain Layanan target (to-be). Berikut ini adalah identifikasi Arsitektur Layanan SPBE saat ini (as-is) Kabupaten Muara Enim:

2.6.1 Penerapan Keamanan SPBE

- Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Tabel 13. Tabel Arsitektur Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
DAK.01	Sosialisasi Keamanan Informasi	Sosialisasi Keamanan Informasi dengan Tema "Wujudkan Keamanan Informasi untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Baik menuju Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera yang diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkup pemkab muara enim	5 September 2019
DAK.02	Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Melalui Email Sanapati	Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Melalui Email Sanapati untuk 9 OPD di Kabupaten Muara Enim	22 November 2022
DAK.03	Publikasi video Keamanan Siber "Waspada Malware"	Publikasi berupa penayangan video edukasi waspada malware di sosial media youtube Diskominfo Muara Enim https://youtu.be/GOs_1aw5qDw	tahun 2023
DAK.04	Publikasi dokumen panduan keamanan penggunaan sosial media facebook	dokumen panduan keamanan penggunaan sosial media dengan judul panduan keamanan pengguna facebook yang dipublikasikan pada sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE SIMPAN.MUARAENIMKAB.GO.ID	tahun 2023
DAK.05	Publikasi dokumen panduan keamanan youtube	dokumen panduan keamanan penggunaan sosial media dengan judul panduan keamanan pengguna youtube yang dipublikasikan pada sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE SIMPAN.MUARAENIMKAB.GO.ID	tahun 2023

- **Peningkatan Keamanan SPBE**

Tabel 14. Tabel Arsitektur Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE
DAK.01	Penerapan Sertifikat Elektronik (TTE) pada Sistem Elektronik di Kabupaten Muara Enim	Integrasi Sistem Elektronik dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN RI yang diterapkan pada seluruh unit kerja	Sekarang
DAK.02	Pembentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui e-mail Sanapati	Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui e-mail Sanapati pada 9 OPD di Kabupaten Muara Enim	Sekarang
DAK.03	Kegiatan Perlindungan Informasi Kontra Penginderaan / Sterilisasi Pada Aset / Fasilitas Penting Milik Atau yang akan di gunakan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Kegiatan Perlindungan Informasi Kontra Penginderaan / Sterilisasi Pada Aset / Fasilitas Penting Milik Atau yang akan di gunakan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Sekarang
DAK.04	Firewall Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan jaringan intra pemerintah kabupaten muara enim	Sekarang

2.6.2 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

- Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Tabel 15. Tabel Arsitektur Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

ID	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan (Isikan sekarang jika peraturannya masih digunakan sampai saat ini)
DAK.01	Sertifikat Elektronik	1. Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Prosedur Standar Penerapan Keamanan Dokumen Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN RI	24 Agustus 2022	Sekarang
DAK.02	Surat Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Tim Respon Insiden Siber Pemerintah Kab. Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT)	3. Regulasi Lainnya	SK Bupati Muara Enim Tentang pembentukan Tim Respon Insiden Siber dalam rangkan merespon laporan insiden siber serta penanggulangan pemulihan insiden keaman siber dengan konstituen OPD di Kabupaten Muara Enim	26 Januari 2023	Sekarang

BAB III TARGET ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN MUARA ENIM

3.1. Latar Belakang

Arsitektur SPBE To-Be disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan strategi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim serta juga mengacu ke inisiatif strategis pada kebijakan nasional. Adapun tujuan dan sasaran pada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 - 2026 yang tertuang sebagai berikut:

Tabel 16. Tabel RPD Kabupaten Muara Enim

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat		Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	n/a	Padapa (71-80)	Padapa (71-80)	Wiwerda (81-90)
		1.1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.6	0.7	0.8
		1.2 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	4.98	5.08	5.18	5.28
		1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	61.70	61.80	61.90	70.00
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5.46	5.54	5.62	5.70
		2.1 Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	8,39	6.60	7.01	7.44
		2.2 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,320	0,319	0,318	0,317
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	69.43	69.79	70.15	70.51
		3.1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.38	69.63	69.88	70.05

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET			
				2022	2024	2025	2026	
		3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	11.99	12.00	12.01	12.02
				Rata-Rata Lama Sekolah	7.9	7.98	8.06	9.00
		3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,304	11,450	11,597	11,744
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	
		4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B
		4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.91	3.00	3.10	3.20
		4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB
		4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	3.90	4.22	4.54	4.86
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	11.12	10.71	10.29	9.88	
		5.1	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	85,55	81.73	78.69	75.76
		5.2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.12	4.00	3.88	3.76
		5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	85.00	87.00	90.00	92.00
		5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.02	1.01	1.00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET			
				2022	2024	2025	2026	
		5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	91.88	93.88	95.88	97.88
6	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	89.67	89.76	89.85	89.93	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.65	74.52	77.39	80.25	
		6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0.09	0.09	0.09	0.09
		6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2.87	2.87	2.87	2.87
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak		Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	
		7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	3.25	6.10	10.20	12.20

Selain itu, penyusunan Arsitektur SPBE To-Be juga mempertimbangkan kebijakan strategis nasional seperti Reformasi Birokrasi yang saat ini berfokus pada 4 area tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden seperti pengentasan stunting, dan yang terakhir adalah terkait digitalisasi administrasi pemerintahan. Sedangkan, pada inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dimana sesuai dengan tematik layanan digital yang tertuang di dalam Perpres tersebut maka memiliki target keluaran inisiatif strategis dalam bentuk layanan sebanyak 19 inisiatif strategis.

Maka dari itu, Arsitektur SPBE To-Be Kabupaten Muara Enim dideskripsikan dalam substansi Arsitektur SPBE yang ditargetkan akan dicapai sampai dengan tahun 2026. Substansi arsitektur tersebut memuat seluruh target pencapaian arsitektur SPBE di ke-enam Domain Arsitektur SPBE. Adapun pendekatan penyusunan Arsitektur SPBE To-Be tertuang dalam target prioritas sebagai berikut.

3.2. Target Prioritas Pengentasan Kemiskinan

3.2.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Rincian dari domain Arsitektur Proses Bisnis yang menjadi target penerapan pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.18] Pemantauan pembangunan pekerjaan umum	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[RAB.03] Pembangunan Kewilayahan [RAB.03.01] Pekerjaan Umum	[PEMKABME-DAD.18] [PEMKABME-DAL.18]
[PEMKABME-DAB.19] Pemantauan pembangunan perumahan rakyat	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[RAB.03] Pembangunan Kewilayahan [RAB.03.02] Perumahan	[PEMKABME-DAD.19] [PEMKABME-DAL.19]
[PEMKABME-DAB.20] Penyelenggaraan layanan kesehatan terpadu	Proses bisnis terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem <i>personal health care</i>	[RAB.04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [RAB.04.01] Kesehatan	[PEMKABME-DAD.20] [PEMKABME-DAL.20]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.21] Penyelenggaraan bantuan sosial terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[RAB.04] Pelindungan Sosial dan Kesehatan [RAB.04.02] Sosial	[PEMKABME-DAD.21] [PEMKABME-DAL.21]
[PEMKABME-DAB.22] Penyelenggaraan bantuan pendidikan terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan pendidikan	[RAB.06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [RAB.06.01] Pendidikan	[PEMKABME-DAD.22] [PEMKABME-DAL.22]
[PEMKABME-DAB.23] Penyelenggaraan bantuan listrik terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan listrik	[RAB.07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [RAB.07.02] Energi	[PEMKABME-DAD.23] [PEMKABME-DAL.23]
[PEMKABME-DAB.24] Penyelenggaraan bantuan kesehatan terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan kesehatan	[RAB.04] Pelindungan Sosial dan Kesehatan [RAB.04.01] Kesehatan	[PEMKABME-DAD.24] [PEMKABME-DAL.24]
[PEMKABME-DAB.27] Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Teknologi	Proses bisnis terkait layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	[RAB.06] Pendidikan dan Tenaga Kerja	[PEMKABME-DAD.27]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
		[RAB.06.01] Pendidikan	[PEMKABME-DAL.27]

3.2.2. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Rincian dari domain Arsitektur Data dan informasi yang menjadi target penerapan pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAD.18] Data dan Informasi pemantauan pembangunan pekerjaan umum	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[RAD.03] Informasi Pembangunan Kewilayahan [RAD.03.01] Data Pekerjaan Umum	[PEMKABME-DAB.18] [PEMKABME-DAL.18] [PEMKABME-DAA.02] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.19] Data dan Informasi pemantauan pembangunan perumahan rakyat	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[RAD.03] Informasi Pembangunan Kewilayahan [RAD.03.04] Data Perumahan	[PEMKABME-DAB.19] [PEMKABME-DAL.19] [PEMKABME-DAA.02] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAD.20] Data dan Informasi kesehatan terpadu	Data dan informasi terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem personal health care	[RAD.04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [RAD.04.01] Data Kesehatan	[PEMKABME-DAB.20] [PEMKABME-DAL.20] [PEMKABME-DAA.03] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.21] Data dan Informasi bantuan sosial terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[RAD.04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [RAD.04.02] Data Sosial	[PEMKABME-DAB.21] [PEMKABME-DAL.21] [PEMKABME-DAA.04] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.22] Data dan Informasi bantuan pendidikan terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan pendidikan	[RAD.06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [RAD.06.01] Data Pendidikan	[PEMKABME-DAB.22] [PEMKABME-DAL.22] [PEMKABME-DAA.04] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.23] Data dan Informasi bantuan listrik terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan listrik	[RAD.07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [RAD.07.02] Data Energi	[PEMKABME-DAB.23] [PEMKABME-DAL.23] [PEMKABME-DAA.04]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
			[PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.24] Data dan Informasi bantuan kesehatan terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan kesehatan	[RAD.04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [RAD.04.01] Data Kesehatan	[PEMKABME-DAB.24] [PEMKABME-DAL.24] [PEMKABME-DAA.04] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.27] Data dan Informasi Pendidikan	Data layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	[RAD.06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [RAD.06.01] Data Pendidikan	[PEMKABME-DAB.27] [PEMKABME-DAL.27] [PEMKABME-DAA.07] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

3.2.3. Domain Arsitektur Layanan

Tabel 19. Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAL.18] Layanan pemantauan	Layanan terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[RAL.01] Layanan Publik	[PEMKABME-DAB.18]

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
pembangunan pekerjaan umum		[RAL.01.17] Pekerjaan Umum	[PEMKABME-DAD.18] [PEMKABME-DAA.02]
[PEMKABME-DAL.19] Layanan pemantauan pembangunan perumahan rakyat	Layanan terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.41] Perumahan	[PEMKABME-DAB.19] [PEMKABME-DAD.19] [PEMKABME-DAA.02]
[PEMKABME-DAL.20] Layanan kesehatan terpadu	Layanan terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem personal health care	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.25] Kesehatan	[PEMKABME-DAB.20] [PEMKABME-DAD.20] [PEMKABME-DAA.03]
[PEMKABME-DAL.21] Layanan bantuan sosial terintegrasi	Layanan terkait bantuan sosial dan layanan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.26] Sosial	[PEMKABME-DAB.21] [PEMKABME-DAD.21] [PEMKABME-DAA.04]
[PEMKABME-DAL.22] Layanan bantuan pendidikan terintegrasi	Layanan terkait bantuan bantuan pendidikan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.26] Sosial	[PEMKABME-DAB.22] [PEMKABME-DAD.22] [PEMKABME-DAA.04]
[PEMKABME-DAL.23] Layanan bantuan listrik terintegrasi	Layanan terkait bantuan listrik	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.26] Sosial	[PEMKABME-DAB.23] [PEMKABME-DAD.23]

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
			[PEMKABME-DAA.04]
[PEMKABME-DAL.24] Layanan bantuan kesehatan terintegrasi	Layanan terkait bantuan kesehatan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.26] Sosial	[PEMKABME-DAB.24] [PEMKABME-DAD.24] [PEMKABME-DAA.04]
[PEMKABME-DAL.27] Layanan Pendidikan	layanan pendidikan dan layanan penyediaan konten digital	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.31] Pendidikan	[PEMKABME-DAB.27] [PEMKABME-DAD.27] [PEMKABME-DAA.07]

3.2.4. Domain Arsitektur Aplikasi

Tabel 20. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi

Domain Arsitektur Aplikasi	Deskripsi Aplikasi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAA.02] Aplikasi pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Aplikasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	[RAA.02] Aplikasi Khusus [RAA.02.02] Aplikasi Fungsi Tertentu	[PEMKABME-DAD.18-19] [PEMKABME-DAL.18-19] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAA.03] Aplikasi kesehatan terpadu	Aplikasi terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan	[RAA.01] Aplikasi Umum	[PEMKABME-DAD.20]

Domain Arsitektur Aplikasi	Deskripsi Aplikasi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
	online, rekam medis online, dan sistem personal health care	[RAA.01.01] Aplikasi Layanan Publik	[PEMKABME-DAL.20] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAA.04] Aplikasi bantuan sosial terintegrasi	Aplikasi terkait bantuan sosial terintegrasi, termasuk didalamnya berupa kegiatan layanan bantuan listrik, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan kesehatan, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[RAA.01] Aplikasi Umum [RAA.01.01] Aplikasi Layanan Publik [RAA.01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[PEMKABME-DAD.21-24] [PEMKABME-DAL.21-24] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAA.07] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[PEMKABME-DAD.27] [PEMKABME-DAL.27] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

3.2.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tabel 21. Identifikasi Target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAI.01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.01] Fasilitas Komputasi [RAI.01.01] Pusat Data Nasional [RAI.01.02] Pusat Komputasi [RAI.01.03] Pusat Kendali	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAI.02] Sistem Integrasi	Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.02] Sistem Integrasi [RAI.02.01] Jaringan Intra Pemerintah [RAI.02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAI.03] Platform	Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i> , menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.03] Platform [RAI.03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi [RAI.03.02] Komputasi Awan	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

3.2.6. Domain Arsitektur Keamanan

Tabel 22. Identifikasi Target Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAK.01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.	[RAK.01] Standar Keamanan [RAK.01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE [RAK.01.02] Standar nasional/internasional terkait keamanan APBE [RAK.01.03] Regulasi lainnya	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03]

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[[PEMKABME- DAK.02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.	[RAK.02] Penerapan Keamanan [RAK.02.01] Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE [RAK.02.02] Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE [RAK.02.03] Peningkatan Keamanan SPBE [RAK.02.04] Penanganan Insiden Keamanan SPBE [RAK.02.05] Audit Keamanan SPBE	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME- DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]
[PEMKABME- DAK.03] Kelaikan Keamanan SPBE	Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi umum SPBE dan infrastruktur SPBE Nasional	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME- DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]

3.3. Target Prioritas Peningkatan Investasi

3.3.1. Domain Proses Bisnis

Tabel 23. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.01] Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Proses bisnis terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[RAB.07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [RAB.07.02] Energi	[PEMKABME-DAD.01] [PEMKABME-DAL.01]
[PEMKABME-DAB.02] Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[RAB.02] Ekonomi dan Industri [RAB.02.03] Pertanian	[PEMKABME-DAD.02] [PEMKABME-DAL.02]
[PEMKABME-DAB.03] Perizinan Sektor Kehutanan	Proses bisnis terkait perizinan sektor kehutanan	[RAB.07] Lingkungan dan Sumber daya alam [RAB.07.03] Kehutanan	[PEMKABME-DAD.03] [PEMKABME-DAL.03]
[PEMKABME-DAB.04] Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Proses bisnis terkait sektor lingkungan hidup	[RAB.07] Lingkungan dan Sumber daya alam [RAB.07.05] Lingkungan Hidup	[PEMKABME-DAD.04] [PEMKABME-DAL.04]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.05] Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Proses bisnis terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[RAB.03] Pembangunan Kewilayahan [RAB.03.01] Pekerjaan Umum	[PEMKABME-DAD.05] [PEMKABME-DAL.05]
[PEMKABME-DAB.06] Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Proses bisnis terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[RAB.03] Pembangunan Kewilayahan [RAB.03.04] Perumahan	[PEMKABME-DAD.06] [PEMKABME-DAL.06]
[PEMKABME-DAB.07] Perizinan Sektor Pendidikan	Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[RAB.06] Pendidikan dan Tenaga kerja [RAB.06.01] Pendidikan	[PEMKABME-DAD.07] [PEMKABME-DAL.07]
[PEMKABME-DAB.08] Perizinan Sektor Keagamaan	Proses bisnis terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[RAB.08] Agama dan kebudayaan [RAB.08.01] Agama	[PEMKABME-DAD.08] [PEMKABME-DAL.08]
[PEMKABME-DAB.09] Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[RAB.02] Ekonomi dan Industri [RAB.02.06] Perikanan	[PEMKABME-DAD.09] [PEMKABME-DAL.09]
[PEMKABME-DAB.10] Perizinan Sektor Kesehatan, obat dan makanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, obat dan makanan	[RAB.04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [RAB.04.01] kesehatan	[PEMKABME-DAD.10] [PEMKABME-DAL.10]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.11] Perizinan Sektor Perdagangan	Proses bisnis terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[RAB.02] Ekonomi dan Industri [RAB.02.02] Perdagangan	[PEMKABME-DAD.11] [PEMKABME-DAL.11]
[PEMKABME-DAB.12] Perizinan Sektor UMKM	Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[RAB.02] Ekonomi dan Industri [RAB.02.10] Usaha Kecil dan Menengah	[PEMKABME-DAD.12] [PEMKABME-DAL.12]
[PEMKABME-DAB.13] Perizinan Sektor Informasi	Proses bisnis terkait informatika	[RAB.09] Pemerintahan Umum [RAB.09.03] Informasi	[PEMKABME-DAD.13] [PEMKABME-DAL.13]
[PEMKABME-DAB.14] Perizinan Sektor Komunikasi	Proses bisnis terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[RAB.09] Pemerintahan Umum [RAB.09.04] Komunikasi	[PEMKABME-DAD.14] [PEMKABME-DAL.14]
[PEMKABME-DAB.16] Perizinan Sektor Pariwisata	Proses bisnis terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[RAB.02] Ekonomi dan Industri [RAB.02.11] Pariwisata	[PEMKABME-DAD.16] [PEMKABME-DAL.16]
[PEMKABME-DAB.17] Perizinan Sektor Keuangan	Proses bisnis terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[RAB.09] Pemerintahan Umum [RAB.09.02] Keuangan	[PEMKABME-DAD.17] [PEMKABME-DAL.17]

3.3.2. Domain Data dan Informasi

Tabel 24. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAD.01] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Data dan informasi terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[RAD.07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Data Energi	[PEMKABME-DAB.01] [PEMKABME-DAL.01] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.02] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[RAD.02] Informasi Ekonomi dan Industri [RAD.02.03] Data Pertanian	[PEMKABME-DAB.02] [PEMKABME-DAL.02] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.03] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kehutanan	Data dan informasi terkait perizinan sektor kehutanan	[RAD.07] Informasi Lingkungan dan Sumber daya alam [RAD.07.03] Data Kehutanan	[PEMKABME-DAB.03] [PEMKABME-DAL.03] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAD.04] Data dan Informasi Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Data dan informasi terkait sektor lingkungan hidup	[RAD.07] Informasi Lingkungan dan Sumber daya alam [RAD.07.05] Data Lingkungan Hidup	[PEMKABME-DAB.04] [PEMKABME-DAL.04] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.05] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Data dan informasi terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[RAD.03] Informasi Pembangunan Kewilayahan [RAD.03.01] Data Pekerjaan Umum	[PEMKABME-DAB.05] [PEMKABME-DAL.05] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.06] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Data dan informasi terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[RAD.03] Informasi Pembangunan Kewilayahan [RAD.03.04] Data Perumahan	[PEMKABME-DAB.06] [PEMKABME-DAL.06] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.07] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pendidikan	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[RAD.06] Informasi Pendidikan dan Tenaga kerja [RAD.06.01] Data Pendidikan	[PEMKABME-DAB.07] [PEMKABME-DAL.07]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
			[PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.08] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keagamaan	Data dan informasi terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[RAD.08] Informasi Agama dan kebudayaan [RAD.08.01] Data Agama	[PEMKABME-DAB.08] [PEMKABME-DAL.08] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.09] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[RAD.02] Informasi Ekonomi dan Industri [RAD.02.06] Data Perikanan	[PEMKABME-DAB.09] [PEMKABME-DAL.09] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.10] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kesehatan	Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, serta obat dan makanan	[RAD.04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [RAD.04.01] Data kesehatan	[PEMKABME-DAB.10] [PEMKABME-DAL.10] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
			[PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.11] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perdagangan	Data dan informasi terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[RAD.02] Informasi Ekonomi dan Industri [RAD.02.02] Data Perdagangan	[PEMKABME-DAB.11] [PEMKABME-DAL.11] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.12] Data dan Informasi Perizinan Sektor UMKM	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[RAD.02] Informasi Ekonomi dan Industri [RAD.02.10] Data Usaha Kecil dan Menengah	[PEMKABME-DAB.12] [PEMKABME-DAL.12] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.13] Data dan Informasi Perizinan Sektor Informasi	Data dan informasi terkait perizinan sektor informatika	[RAD.09] Informasi Pemerintahan Umum [RAD.09.03] Data Informasi	[PEMKABME-DAB.13] [PEMKABME-DAL.13] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAD.14] Data dan Informasi Perizinan Sektor Komunikasi	Data dan informasi terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[RAD.09] Informasi Pemerintahan Umum [RAD.09.04] Data Komunikasi	[PEMKABME-DAB.14] [PEMKABME-DAL.14] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.15] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Data dan informasi terkait perizinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[RAD.06] Informasi Pendidikan dan Tenaga kerja [RAD.06.04] Data Teknologi	[PEMKABME-DAB.15] [PEMKABME-DAL.15] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.16] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pariwisata	Data dan informasi terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[RAD.02] Informasi Ekonomi dan Industri [RAD.02.11] Data Pariwisata	[PEMKABME-DAB.16] [PEMKABME-DAL.16] [PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]
[PEMKABME-DAD.17] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keuangan	Data terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[RAD.09] Informasi Pemerintahan Umum [RAD.09.02] Data Keuangan	[PEMKABME-DAB.17] [PEMKABME-DAL.17]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
			[PEMKABME-DAA.01] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

3.3.3. Domain Arsitektur Layanan

Tabel 25. Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan SPBE

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAL.01] Layanan Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Layanan terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.05] Industri [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.01] [PEMKABME-DAD.01] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.02] Layanan Perizinan Sektor Pertanian	Layanan terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.02] [PEMKABME-DAD.02] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.03] Layanan Perizinan Sektor Kehutanan	Layanan terkait perizinan sektor kehutanan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.03] [PEMKABME-DAD.03] [PEMKABME-DAA.01]

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAL.04] Layanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Layanan terkait perizinan sektor lingkungan hidup	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.04] [PEMKABME-DAD.04] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.05] Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Layanan terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.05] [PEMKABME-DAD.05] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.06] Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Layanan terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.06] [PEMKABME-DAD.06] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.07] Layanan Perizinan Sektor Pendidikan	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.07] [PEMKABME-DAD.07] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.08] Layanan Perizinan Sektor Keagamaan	Layanan terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.08] [PEMKABME-DAD.08] [PEMKABME-DAA.01]

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAL.09] Layanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Layanan terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.09] [PEMKABME-DAD.09] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.10] Layanan Perizinan Sektor Kesehatan	Layanan terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, obat dan makanan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.10] [PEMKABME-DAD.10] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.11] Layanan Perizinan Sektor Perdagangan	Layanan terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.11] [PEMKABME-DAD.11] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.12] Layanan Perizinan Sektor UMKM	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.12] [PEMKABME-DAD.12] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.13] Layanan Perizinan Sektor Informasi	Layanan terkait perizinan sistem informatika	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.13] [PEMKABME-DAD.13] [PEMKABME-DAA.01]

Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAL.14] Layanan Perizinan Sektor Komunikasi	Layanan terkait peizinan pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, sistem komunikasi, serta penyelenggaraan penyiaran	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.14] [PEMKABME-DAD.14] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.16] Layanan Perizinan Sektor Pariwisata	Layanan terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.16] [PEMKABME-DAD.16] [PEMKABME-DAA.01]
[PEMKABME-DAL.17] Layanan Perizinan Sektor Keuangan	Layanan terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[RAL.01] Layanan Publik [RAL.01.16] Perizinan dan Akreditasi	[PEMKABME-DAB.17] [PEMKABME-DAD.17] [PEMKABME-DAA.0]

3.3.4. Domain Aplikasi

Tabel 25. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Arsitektur Aplikasi	Deskripsi Aplikasi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAA.01] Aplikasi Perizinan Terintegrasi	Aplikasi perizinan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sektor	[RAL.01] Aplikasi Umum [RAL.01.01] Aplikasi Layanan Publik	[PEMKABME-DAD.01-17] [PEMKABME-DAL.01-17] [PEMKABME-DAI.01-03] [PEMKABME-DAK.01-04]

3.3.5. Domain Infrastruktur SPBE

Tabel 26. Identifikasi Target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAI.01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.01] Fasilitas Komputasi [RAI.01.01] Pusat Data Nasional [RAI.01.02] Pusat Komputasi [RAI.01.03] Pusat Kendali	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAI.02] Sistem Integrasi	Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.02] Sistem Integrasi [RAI.02.01] Jaringan Intra Pemerintah [RAI.02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAI.03] Platform	Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i> , menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.03] Platform [RAI.03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi [RAI.03.02] Komputasi Awan	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

3.3.6. Domain Keamanan

Tabel 27. Identifikasi Target Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAK.01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.	[RAK.01] Standar Keamanan [RAK.01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE [RAK.01.02] Standar nasional/internasional terkait keamanan APBE [RAK.01.03] Regulasi lainnya	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03]

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[[PEMKABME- DAK.02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.	[RAK.02] Penerapan Keamanan [RAK.02.01] Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE [RAK.02.02] Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE [RAK.02.03] Peningkatan Keamanan SPBE [RAK.02.04] Penanganan Insiden Keamanan SPBE [RAK.02.05] Audit Keamanan SPBE	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME- DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]]
[PEMKABME- DAK.03] Kelaikan Keamanan SPBE	Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi umum SPBE dan infrastruktur SPBE Nasional	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME- DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]

3.4. Target Prioritas Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Target prioritas digitalisasi administrasi pemerintahan difokuskan untuk memastikan keterpaduan layanan pemerintahan umum berbasis elektronik yang didukung oleh penerapan satu data Indonesia. Layanan pemerintahan umum diprioritaskan pada layanan perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, barang milik negara, dan layanan pemerintahan umum lainnya. Seluruh layanan administrasi pemerintahan umum ini diterapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip satu data Indonesia, yang disesuaikan interkoneksinya dengan menerapkan arsitektur SPBE.

Secara detail target arsitektur SPBE pada prioritas digitalisasi administrasi pemerintahan antara lain:

3.4.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Tabel 28. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
Proses Bisnis Pemerintahan Umum			
[PEMKABME-DAB.09.01] Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dalam negeri	Proses bisnis terkait pemerintahan dalam negeri	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.01] Dalam Negeri	[PEMKABME-DAD.09.01] [PEMKABME-DAL.09.01]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.09.02] Penyelenggaraan layanan penganggaran	Proses bisnis terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.02] Keuangan	[PEMKABME-DAD.09.02] [PEMKABME-DAL.09.02]
[PEMKABME-DAB.09.05] Penyelenggaraan layanan perencanaan	Proses bisnis terkait perencanaan pembangunan	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.05] Perencanaan Pembangunan Nasional	[PEMKABME-DAD.09.05] [PEMKABME-DAL.09.05]
[PEMKABME-DAB.09.06] Penyelenggaraan layanan aparatur negara	Proses bisnis terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.06] Aparatur Negara	[PEMKABME-DAD.09.06] [PEMKABME-DAL.09.06]
Proses Bisnis Satu Data Muara Enim			
[PEMKABME-DAB.09.03] Pengelolaan data statistik	Proses bisnis terkait manajemen data statistik	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.03] Informasi	[PEMKABME-DAD.09.03] [PEMKABME-DAL.09.03]

Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur SPBE Terkait
[PEMKABME-DAB.09.03] Pengelolaan data geospasial	Proses bisnis terkait manajemen data geospasial	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.03] Informasi	[PEMKABME-DAD.09.03] [PEMKABME-DAL.09.03]
[PEMKABME-DAB.09.02] Pengelolaan data keuangan negara	Proses bisnis terkait manajemen data keuangan negara	[RAB.09] Pemerintahan umum [RAB.09.02] Keuangan	[PEMKABME-DAD.09.02] [PEMKABME-DAL.09.02]

3.4.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Tabel 29. Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan SPBE

Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Layanan Pemerintahan Umum			
[PEMKABME-DAL.02.01] Layanan Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri	Layanan terkait pemerintahan dalam negeri	[RAL.02] Layanan Administrasi Pemerintahan [RAL.02.01 Dalam Negeri]	[PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAD.09.01]

Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAL.02.02] Layanan Penganggaran	Layanan terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[RAL.02] Layanan Administrasi Pemerintahan [RAL.02.02] Keuangan	[PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAD.09.02]
[PEMKABME-DAL.02.03] Layanan Perencanaan	Layanan terkait perencanaan pembangunan	[RAL.02] Layanan Administrasi Pemerintahan [RAL.02.03] Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional	[PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAD.09.05]
[PEMKABME-DAL.02.04] Layanan Aparatur Negara	Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[RAL.02] Layanan Administrasi Pemerintahan [RAL.02.04] Layanan Aparatur Negara	[PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAD.09.06]
Layanan Satu Data Muara Enim			
[PEMKABME-DAL.02.09] Layanan Portal Satu Data Muara Enim	Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan	[PEMKABME-DAB.09.03] [PEMKABME-DAD.09.03s]

Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
		[02.09] Layanan Data dan Informasi Pemerintahan	

3.4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Tabel 30. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Data Pemerintahan Umum			
[PEMKABME-DAD.09.01] Data dan Informasi Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri	Data dan informasi terkait pemerintahan dalam negeri	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.01] Data Dalam Negeri	[PEMKABME-DAL.02.01] [PEMKABME-DAB.09.01] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAD.09.02] Data dan Informasi Penganggaran	Data dan informasi terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum	[PEMKABME-DAL.02.01]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
	barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[RAD.09.02] Data Keuangan	[PEMKABME-DAB.09.01] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAD.09.05] Data dan Informasi Perencanaan	Data dan informasi terkait perencanaan pembangunan	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional	[PEMKABME-DAL.02.01] [PEMKABME-DAB.09.01] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAD.09.06] Data dan Informasi Aparatur Negara	Data dan informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.06] Data Aparatur Negara	[PEMKABME-DAL.02.01] [PEMKABME-DAB.09.01] [PEMKABME-DAA.01.02]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
			[PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
Satu Data Muara Enim			
[PEMKABME-DAD.09.03] Data Statistik	Data dan informasi terkait manajemen data statistik	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.03] Data Informasi	[PEMKABME-DAL.02.09] [PEMKABME-DAB.09.01] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAD.09.03] Data Geospasial	Data dan informasi terkait manajemen data geospasial	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.03] Data Informasi	[PEMKABME-DAL.02.09] [PEMKABME-DAB.09.03] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03]

Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
			[PEMKABME-DAK.01;02;03]
[PEMKABME-DAD.09.03] Data Keuangan	Data dan informasi terkait manajemen data keuangan negara	[RAD.09] Informasi Pemerintahan umum [RAD.09.02] Data Keuangan	[PEMKABME-DAL.02.09] [PEMKABME-DAB.09.03] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

3.4.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 31. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	Deskripsi Aplikasi SPBE	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAA.01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[RAA.01] Aplikasi Umum [RAA.01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[PEMKABME-DAD.09.01;02;05;06] [PEMKABME-DAL.01.02] [PEMKABME-DAK.01;02;03]

			[PEMKABME- DAI.01;02;03]
[PEMKABME- DAA.01.01] Portal Satu Data Muara Enim	Aplikasi terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[RAA.01] Aplikasi Umum [RAA.01.01] Aplikasi Layanan Publik	[PEMKABME- DAD.09.01;02;05;06] [PEMKABME- DAL.02.09] [PEMKABME- DAK.01;02;03] [PEMKABME- DAI.01;02;03]

3.4.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tabel 32. Identifikasi Target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME- DAI.01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[RAI.01] Fasilitas Komputasi [RAI.01.01] Pusat Data Nasional [RAI.01.02] Pusat Komputasi [RAI.01.03] Pusat Kendali	[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME- DAK.01;02;03]

<p>[PEMKABME-DAI.02] Sistem Integrasi</p>	<p>Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>[RAI.02] Sistem Integrasi</p> <p>[RAI.02.01] Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>[RAI.02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>	<p>[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06]</p> <p>[PEMKABME-DAA.01.02]</p> <p>[PEMKABME-DAK.01;02;03]</p>
<p>[PEMKABME-DAI.03] Platform</p>	<p>Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i>, menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>[RAI.03] Platform</p> <p>[RAI.03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi</p> <p>[RAI.03.02] Komputasi Awan</p>	<p>[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06]</p> <p>[PEMKABME-DAA.01.02]</p> <p>[PEMKABME-DAK.01;02;03]</p>

3.4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 33. Identifikasi Target Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[PEMKABME-DAK.01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.	[RAK.01] Standar Keamanan [RAK.01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE [RAK.01.02] Standar nasional/internasional terkait keamanan APBE [RAK.01.03] Regulasi lainnya	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03]
[[PEMKABME-DAK.02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.	[RAK.02] Penerapan Keamanan [RAK.02.01] Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE [RAK.02.02] Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE [RAK.02.03] Peningkatan Keamanan SPBE [RAK.02.04] Penanganan Insiden Keamanan SPBE [RAK.02.05] Audit Keamanan SPBE	[PEMKABME-DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME-DAI.01;02;03]]

<p>[PEMKABME- DAK.03] Kelaikan Keamanan SPBE</p>	<p>Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi umum SPBE dan infrastruktur SPBE Nasional</p>	<p>[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME-DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]</p>	<p>[PEMKABME- DAD.09.01;02;03;05;06] [PEMKABME- DAA.01.02] [PEMKABME- DAI.01;02;03]</p>
--	---	--	---

BAB IV PENUTUP

Arsitektur SPBE Muara Enim ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan target-target arsitektur yang diprioritaskan, diatur nantinya dalam peraturan tersendiri tentang peta rencana SPBE Kabupaten Muara Enim. Reviu perlu dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan Arsitektur ini telah menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional karena sejatinya arsitektur Kabupaten Muara Enim merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional. Sehingga pelaksanaan target-target arsitektur SPBE di Kabupaten Muara Enim secara tidak langsung mendukung

Sebagai panduan dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kabupaten Muara Enim dan pengintegrasian berbagai unsur-unsur SPBE, maka seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing agar dapat sesuai dengan target-target arsitektur SPBE dalam keputusan Bupati Muara Enim ini.

Dengan adanya penyelarasan antara Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim dengan Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi dan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Muara Enim.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD RIZALI